

BELUM DIKOREKSI

RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Senin, 13 Juni 2016
Waktu : Pukul 11.15 - 16.53 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara :

1. Evaluasi Kinerja Kejaksaan Semester I Tahun 2016, dan optimalisasi peningkatan kinerja Kejaksaan secara keseluruhan serta rencana eksekusi pidana mati tahap ke-III beserta permasalahan di lapangan.
2. Tindaklanjut atas kesimpulan Rapat Kerja sebelumnya.
3. Penjelasan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

KETUA RAPAT (DR. BENNY K. HARMAN, S.,H/F-PD):

Baik. Kita mulai ya Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Selamat pagi, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,**

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi III,

Yang kami hormati Jaksa Agung dan seluruh jajarannya,

Sebelum kita mulai perkenankan kami dari meja Pimpinan mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebab hanya perkenan-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung pagi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan catatan yang ada di meja Pimpinan, rapat kita pada pagi ini telah dihadiri 26 dari 53 Anggota dan 9 dari 10 Fraksi di 26 dari 53, jadi tanggung ini. Oleh sebab itu saya mohon persetujuan Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, apakah berkenan rapat ini kita lanjutkan?

Baik, kita lanjutkan.

Maka atas ijin Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian sesuai dengan peraturan Tata Tertib Dewan perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dan kami nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya atas kesediaan memenuhi undangan Komisi III pada pagi ini. Demikian juga kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi III kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Agenda kita pada pagi ini, kita bagi 2. Yang pertama, mulai pukul 1.30 sampai 12.30 kita akan mendengarkan penjelasan Jaksa Agung berkenaan dengan RKAKL dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Jadi rencana kerja dan rencana anggaran, rencana kerja Pemerintah Tahun 2017 sesuai dengan siklus pembahasan anggaran untuk APBN 2017. Lalu nanti setelah 1 jam pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.00 kita istirahat dan kita masuk lagi pukul 14.00 sampai selesai. Kita lanjutkan dengan Rapat Khusus berkenaan dengan pengawas. Jadi sampai jam berapa nanti kita akan sepakati sehingga dengan demikian kami mohon persetujuan. Rapat ini kita akan, untuk tahap pertama kita akan akhiri pukul 12.30 ya. Pak Jaksa Agung, itu 12.30 lalu nanti kita istirahat.

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Demikian pengantar singkat kami. Untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Jaksa Agung untuk menyampaikan penjelasan mengenai RKAKL dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Kami persilakan.

JAKSA AGUNG RI:

Baik.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Selamat siang, dan
Salam sejahtera,
Oom Swastiastu.**

**Yang saya hormati dan muliakan para Pimpinan Komisi III,
Pimpinan Rapat Pak Benny Karman, Pak Bambang Satyo dan Pak Desmond
Mahesa,
Segenap Anggota Komisi III yang saya muliakan.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas konstitusional kita, menyelenggarakan Rapat Kerja antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI. Tentunya juga saya kembali mengucapkan selamat karena kita telah memasuki hari ke-8 melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan jasmani-rohani agar dapat menyelesaikan kewajiban khususnya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa.

Sesuai yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat tadi bahwa sebenarnya materi dari bahasan dalam Rapat Kerja kali ini adalah sesuai dengan apa yang kami terima undangan dari Wakil Ketua DPR RI tanggal 27 Mei 2016 ditentukan pokok bahasannya adalah meliputi: pertama, evaluasi kinerja Kejaksaan semester I sampai dengan setahun 2016 dan optimalisasi kinerja kejaksaan secara keseluruhan termasuk rencana eksekusi pidana mati tahap ke-3 beserta permasalahan dilapangan. Kemudian membahas tindak lanjut kesimpulan Raker-raker sebelumnya. Baru kemudian penjelasan rencana kerja anggaran kejaksaan 2017 dikaitkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Dan sebenarnya semua yang diagendakan dan diminta oleh Komisi III telah kami siapkan dalam bentuk naskah tertulis yang cukup tebal. Karenanya mungkin nanti kami akan berikan pengantarnya saja. Dan saat ini nampaknya ditentukan untuk akan membahas terlebih dahulu Rencana Kerja Anggaran Kejaksaan 2017. Karena tentunya ini adalah bidang tugasnya Jaksa Agung dan pembinaan. Karenanya untuk lebih jelasnya dan semuanya mendapatkan penjelasan dan gambaran yang lebih komprehensif. Saya mohon ijin Pimpinan Rapat Kerja untuk kiranya yang menyampaikan penjelasan tentang RKA Kejaksaan 2017 ini adalah Saudara Jaksa Agung Muda pembinaan. Kalau diijinkan saya.

Silakan Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN JAKSA AGUNG RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Selamat pagi,
Salam sejahtera,**

**Oom swastiastu,
Saloom,**

Mohon ijin Pak Jaksa Agung.

Bapak Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota Komisi III yang kami hormati,

Atas seijin Pak Jaksa Agung kami akan menyampaikan RKAKL Kejaksaan Tahun 2017 yang nantinya dalam besarnya jumlahnya Rp4.636.775.337.000 dan ini akan terbagi didalam 3 hal utama, yaitu belanja pegawai sejumlah Rp2.830.979.537.000,- kemudian belanja operasional Rp562.000.000.000,- kemudian belanja non operasional Rp1.243.769.000.000,- Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp4.636.775.370.000,- Dan ini jumlahnya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Sebelum ada APBNP atau anggaran BUN.

Dari 3 hal yang utama tadi dibagi dalam 8 program, yaitu halaman 31, 32 mohon ijin Bapak. Dengan rincian program pertama adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kejaksaan, sejumlah Rp3.442.535.117.000,-. Yang kedua mengenai program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan sejumlah Rp136.618.782.000,- Kemudian yang ketiga, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan sejumlah Rp22.945.693.000,- Kemudian keempat, program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan sejumlah Rp119.713.514.000,- Yang kelima, program penyelidikan, pengamanan, penggalangan, permasalahan hukum dibidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam sejumlah Rp73.824.511.000,- Yang keenam, program penanganan dan penyelesaian pidana umum sejumlah Rp463.316.637.000,- Ini untuk nantinya hukuman mati diperkirakan 30, kemudian untuk seluruh Indonesia 116.000 perkara. Kemudian untuk di Kejaksaan Agung menyelesaikan 450 perkara. Kemudian yang ketujuh, program penanganan dan penyelesaian perkara Pidsus, pelanggaran HAM berat dan perkara tindak pidana korupsi. Ini untuk di Kejaksaan alokasinya 140 perkara, kemudian pelanggaran HAM berat 2 perkara, kemudian untuk seluruh Kejaksaan tinggi dialokasikan sekitar 1058 perkara. Kemudian yang kedelapan adalah penanganan dan penyelesaian perkara, perdata dan tata usaha negara sejumlah Rp17.646.346.000,-.

Mengenai uraian tadi, yang pertama program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Ini dibagi ada beberapa kelompok yaitu kelompok belanja pegawai. Jumlahnya 2 Triliun lebih. Kemudian untuk pilot project system peradilan terpadu yang berbasis IT untuk 5 Kejaksaan Tinggi, kemudian kegiatan rutin biro dan pusat di Kejaksaan Agung dan ada beberapa dukungan teknis lain yaitu di Kejaksaan Tinggi serta beberapa di cabang kejaksaan negeri. Kemudian juga untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan 136 Miliar. Itu intinya adalah pembangunan 2 Kejari yaitu Kejari Mojokerto dan Bombana, kemudian ada rehabilitasi gedung Kejaksaan Tinggi Maluku dan Maluku Utara. Kemudian untuk *speed boat* dan juga untuk tambah daya listrik. Dan ini tentu saja sebenarnya ada kekurangan karena ada 9 Kejaksaan Negeri yang baru yang belum bisa masuk ke anggaran ini. Kemudian untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan. Ini nanti tugas Pak Jamwas. Disitu diperkirakan ada beberapa laporan pengaduan dan ini penyelesaiannya sekitar 1315 laporan untuk seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri.

Kemudian berikutnya mengenai halaman 34, program diklat. Itu sebanyak 119.713.000.000, ini untuk kegiatan dibadan diklat dengan jumlah pendidikan ada beberapa diklat teknis, diklat manajemen, diklat administrasi dan juga ada diklat terpadu, kemudian juga ada revolusi mental.

Kemudian yang kelima, itu terkait dengan program penyelidikan, pengamanan, penggalangan permasalahan hukum dibidang ipoleksosbud hukum dan hankam. Ini anggarannya Rp73.824.511.000,- ini untuk kegiatan layanan di jam intel, kemudian juga untuk kegiatan intelijen yang lain ada 50 laporan dan juga 80 laporan. Kemudian juga untuk kegiatan sandi, kegiatan politik, social dan budaya. Kemudian juga ada kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yaitu ada kegiatan Jaksa masuk sekolah, dan sebagainya. Kemudian juga ada mengenai pelacakan asset pelaku tindak pidana sebanyak 449 laporan.

Keenam, ini terkait dengan program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum yang tadi sudah saya sampaikan yaitu untuk sekitar 30 terpidana mati, kemudian juga untuk seluruh Indonesia sekitar yang diselesaikan 116.624 perkara.

Kemudian ketujuh, program penanganan penyelesaian perkara Pidsus, pelanggaran HAM yang berat dan korupsi. Ini sekitar 360.174.738.000. Ini diperkirakan tadi disampaikan untuk Kejaksaan Agung 140 perkara dan untuk seluruh Indonesia sekitar 1058 perkara yang diselesaikan.

Kemudian kedelapan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Ini untuk beberapa kegiatan mewakili Pemerintah dan juga untuk pemulihan dan perlindungan hak, kemudian juga litigasi, kemudian juga untuk kegiatan yang lainnya ada operasional, pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari dengan target 12 layanan.

Demikian secara garis besar.

Kemudian saya kembalikan ke Bapak Jaksa Agung dan nanti mohon mungkin ada diskusi yang bisa kita.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

JAKSA AGUNG RI:

Demikian tadi Pimpinan Rapat Kerja yang saya hormati penjelasan dari Saudara Jambin selaku salah seorang kuasa pengguna anggaran.

Jadi perlu kami laporkan bahwa dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tingkat Kejaksaan Agung ada 5 satuan kerja yaitu Badan Diklat, kemudian pembinaan, Bidsus, Bidum, inteligen dan pengawasan. Sementara setiap Kejati dan Kejari pun merupakan satuan kerja masing-masing itu sendiri.

Saya hanya ingin tambahkan disini Pak Pimpinan bahwa berkaitan dengan masalah dana operasional penyelenggaraan perkara ketika kami menentukan perkiraan anggaran yang diperlukan. Sempat ada komentar menyatakan bahwa khususnya praktek korupsi memunculkan pertanyaan perkara korupsi mengapa harus ditargetkan. Jadi sebenarnya disini bukannya kita menargetkan untuk menangani setiap perkara. Tapi bahwa perkiraan dana operasional yang kita perlukan itu adalah untuk menentukan nanti tentunya perkiraan atau ukuran kinerja dari jajaran kejaksaan yang menangani perkara-perkara khusus, baik korupsi maupun pelanggaran HAM berat, bukan rekayasa dan

bukan pula pemaksaan kehendak atau mencari-cari. Kendala berikutnya adalah yang berkaitan dengan masalah moratorium, pembangunan gedung kantor.

Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III,

Bahwa tahun-tahun belakangan ini, Pemerintah telah menyatakan dan memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan gedung kantor. Sementara disisi lain untuk semester pertama ini saja, ada 9 Kejaksaan negeri baru yang telah diputuskan dan disetujui oleh Presiden untuk didirikan terutama di daerah-daerah pemekaran. Tadi disebutkan Mojokerto, Bombana juga Tapone Selatan dan juga didaerah Lampung. Ini adalah kendala kita karena bagaimana pun, ketika didirikan Kejaksaan Negeri baru tentunya konsekuensinya harus membuat gedung kantor. Nah ini yang merupakan kendala kita. Karena kantor adalah tempat kerja, mungkin tidak seperti instansi lain yang mereka harus banyak turun kelapangan memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya di lapangan. Sementara Kejaksaan, kantor adalah tempat untuk bekerja.

Berikutnya mengenai masalah Datun bahwa kami perlu tegaskan lagi disini bahwa kinerja Datun sepenuhnya adalah ... non fee sehingga kita harus memanfaatkan segala dana yang tersedia dalam DIPA kita yang sering kali justru tidak mencukupi atau sering kali juga ada dana-dana yang diluar perkiraan sebelumnya. Seperti contohnya ketika kita harus mengeklusi putusan tentang yayasan super semar itu dana sebagai pihak yang berperkara dalam kasus itu belum ... sehingga itu yang kami sampaikan dalam Rapat Kerja yang lalu, kami memerlukan tambahan biaya yang tentunya itu semuanya dimaksudkan untuk menangani keberhasilan ekslusi dari gugatan perdata kita untuk yayasan super semar.

Itu mungkin tambahan saya Pak Pimpinan Rapat dan waktu kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada Jaksa Agung yang telah memberikan penjelasan mengenai RKAKL dan RKP Tahun 2017.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,

Penjelasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung tadi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 itu rujukannya adalah 2 kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan revolusi mental di Kejaksaan Agung dan penegakan hukum. Lalu tadi di elaborasi didalam 8 point. 8 program kerja berikut anggarannya.

Selanjutnya kami persilakan Bapak/Ibu Anggota Komisi III untuk mengajukan pertanyaan atau minta klarifikasi berkenaan dengan khusus Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Saya tidak mau berpendapat lebih dahulu. Nanti Bapak/Ibu punya opini terganggu oleh opini saya.

Selanjutnya saya persilakan dulu Bapak/Ibu pakai fraksi-fraksi saja boleh. Yang sudah siap saja dulu. Fraksi yang sudah siap ya. Tapi khusus dulu mengenai RKP 2017. Pengawasan nanti jam 14.00.

Silakan Pak Hasrul yang mantan wakil ketua Badan Anggaran Pak ya.

F-PPP (Drs. H. HASRUL AZHAR, MM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Pak Benny yang saya hormati,
Pak Bambang, Pimpinan kita pada hari ini,
Rekan-rekan sekalian,
Pak Jaksa Agung.**

Saya melihat bahwa anggaran kejaksaan Pak Prasetyo dari tahun ke tahun anggaran tidak naik. Tetap pada angka 4 Triliun. Belum lagi tahun ini dipotong 10% kan Pak. Apalagi tidak boleh membangun kantor baru. Jadi kadang-kadang bertentangan Pak. Satu sisi kejaksaan membuka kantor dengan kebutuhan pemekaran. Itu kan berkonsekuensi harus bangun Pak. kemudian satu sisi tidak boleh membangun kantor. Ini tolong dibicarakan serius dengan teman-teman yang mengelola anggaran ini Pak. nah kalau 4 Triliun ini Pak misalnyalah kita bermatik-matik, membagi-bagi Pak. 4 Triliun ini dibagi 33 kejaksaan atau 34 Pak sekarang ini. Oh 31. Atau 4 Triliunnya dibagi ratusan Gajari itu netesnya Cuma sedikit sekali Pak. Tidak seperti dahaga pada waktu kita kita berbuka puasa. Glek-glek selesai. Netesnya sedikit sekali. Saya melihat 4 Triliun dari tahun ke tahun dibandingkan dengan instansi lain yang mitra Komisi III. Ini ada apa Pak. Atau memang Kejaksaan Agung yang tidak berinovasi melakukan program. Tidak ada diskresi lain yang mengajukan berbagai program-program yang baru. Ada inovasi-inovasi baru. Sehingga dia terjebak dalam rutinitas, ya kalau terjebak dalam rutinitas saja ya, diklat ke diklat, ini-itu, ya tetap saja 4 Triliun Pak Jaksa Agung. Saya bandingkan dengan instansi lain misalnya mitra Komisi III yang misalnya kepolisian. Cukup signifikan kenaikannya Pak. Tahun lalu saja dari, kalau gak salah dari 60 menjadi 67. Dari 60 menjadi 67 Triliun Pak. Ada kenaikan 7 Triliun. Ini Kejaksaan dari 4 malahan turun lagi Pak. Ini yang perlu diperbaiki Pak. Dan Bapak seharusnya mampu memberikan alasan kepada Bapenas atau dalam Rapat Kabinet. Begitu vitalnya Kejaksaan Agung ini dalam penegakan hukum bersama-sama dengan kepolisian dan KPK. Sehingga di daerah juga terkadang beberapa Kejaksaan Tinggi itu tidak memiliki inovasi apa-apa. misalnya ada program. Saya tidak tahu ya. Dulu kita sering hukum masuk desa atau apa, penyuluhan-penyuluhan hukum itu tidak pernah dilakukan oleh Kejaksaan yang setahu saya di daerah saya terutama di Dapil saya tidak ada. Justru yang terbalik Kementerian Hukum dan HAM, memang mungkin profesinya ya yang menawarkan itu. Tapi kan tidak salah juga. Kejaksaan sebagai unsur nuntut negara memberikan penyuluhan hukum. Nah yang seperti ini yang kita harapkan.

Nah jadi intinya Pak Jaksa Agung, mohon diberikan alasan yang benar kepada teman-teman Bapak sama Kementerian atau bahkan kepada Presiden untuk. Ya kita juga nanti disini akan memberikan pengertian lewat Komisi III yang ada di Banggar bahwa anggaran Kejaksaan Agung itu sangat minim. Sangat minim 4 Triliun. Itu sama dengan anggaran Kabupaten yang berpenduduk sekitar 4 atau 5 Juta.

Terima kasih Pak Benny.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih kepada PPP.
Selanjutnya Pak Faisal.

F-NASDEM (AKBAR FAISAL):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pak Jaksa Agung dan jajaran,

Yang pertama semua Kementerian kecuali yang berhubungan dengan infrastruktur itu mengeluh semua karena dipotong. Konon kabarnya seperti itu. Tapi itu adalah kebijakan negara dan sebagai partai pendukung Pemerintah ya saya mendukungnya saja.

Yang kedua adalah kejaksaan agung itu periode 2011, 2013 dan 2014 itu selalu mendapatkan pujian dari fakultas hukum Universitas Hukum Indonesia dalam hal anggaran. Maksudnya adalah anggaran yang terbatas tetapi penyelesaian kasus jauh diatas target. Yang bagus-bagusnya dulu ini. Nah hari ini bagaimana? Tadi Pak Hasrul sudah menjelaskan betapa kondisinya hari ini. Catatan yang ada pada saya 4,5 dari RAPBN 4,9 itu 3,6 Triliun untuk belanja operasional dan non operasional itu 903 Miliar. Lagi-lagi kemudian kita terjebak pada pola penganggaran Kementerian kita yang habis digaji. Itulah alasannya kemudian mungkin Pak Yudi Krisnandi dari partainya Pak Syarifudin Suding, yang baru pulang dari Kuba bahwa untuk merasionalisasi pegawai negeri. Jumlah penduduk 252 juta orang itu menurut Beliau cukup dengan 3,5 juta penduduk pegawai negeri. Yang ingin saya sampaikan bahwa dari sisi ini. Dari sisi anggaran bagaimana kemudian saya mendorong kejaksaan agung untuk ikut juga dalam sebuah semangat agar tak ada lagi karyawan atau PNS yang berlaku seperti karyawan yang lain. Jam 8 tanda tangan, jam 9 di warung kopi.

Selanjutnya adalah kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jambin tadi. ktia berharap sebenarnya ada akrobatik program. Dimana kemudian persoalan anggaran yang jujur saja memang mau tidak mau menjadi masalah bagi kejaksaan agung karena kasus semakin tinggi tapi kemudian malah biaya dikurangi. Maka untuk itu saya berharap sebenarnya Pak Jambin membuat sebuah terobosan untuk mengakali kalimat yang tidak nyaman sebenarnya. Penyelesaian kasus tidak bisa diakali. Apapun namanya, harus ada kejujuran disitu. Tetapi realitasnya memang bahwa anggarannya terbatas sekali dan kasus semakin banyak. Jujur sampai sekarang, saya sebagai bagian dari mitra Bapak belum pernah mendengarkan kira-kira bagaimana mengatasi masalah ini. Sebab, kalau kemudian berdasarkan anggaran saja maka kemudian penyelesaian kasus bagaimana? Tidakkah kita mengenal *justice delay, justice deny*. Kalau kemudian tergantung terus menerus dan kemudian bagaimana kemudian keadilan itu sendiri.

Saya mempercepat saja. Saya minta sebenarnya teman-teman dari Komisi III terutama yang di Banggar untuk bertarung memperjuangkan bagaimana kemudian

anggaran di Bapak-bapak dari Kejaksaan Agung ini bisa lebih ditingkatkan. Saya ada 5 argumentasi. Kenapa kemudian anggaran kejaksaan itu perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah penyesuaian tariff terhadap target penyelesaian perkara yang diatur dalam RPJMN. Kalau kemudian anggarannya seperti ini, saya yakin tidak akan pernah tercapai. Yang kedua adalah mencegah mandeknya perkara yang disidik kepolisian akibat kurangnya anggaran penuntutan di Kejaksaan. Pasti itu. Maka kemudian saling curiga antara 2 lembaga yang sangat penting ini bisa saja terjadi. Yang ketiga adalah mengurangi potensi terjadinya acrobat dan korupsi anggaran dari birokrasi kejaksaan itu sendiri. Yang keempat, membahayakan independensi kejaksaan dan penegakan hukum karena perkara ditangani menggunakan sumber anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa menganalisa apa yang baru saya sampaikan ini. Yang kelima adalah mendukung reformasi, birokrasi anggaran dengan anggaran yang memadai agar kejaksaan semakin professional.

Maka kemudian, tentu saja untuk mencapai itu ada rekomendasi saya Bapak. Yang pertama adalah, sudah 2 kali saya sampaikan di ruangan yang terhormat ini. Itu pencairan anggaran penanganan perkara dengan system *actual cost, rembers*. Sama yang di KPK Pak Jaksa Agung. Jadi anggaran yang tersisa tidak perlu dipaksakan laporan penggunaannya sehingga dapat dialokasikan untuk penanganan perkara yang masih membutuhkan biaya ekstra.

Menaikkan batasan maksimal anggaran yang diberikan dari 3,3 juta menjadi 10 juta untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya sedang dan 25 juta untuk perkara yang tingkat kesulitannya tinggi. Salah satunya yang tinggi kalau gak salah itu adalah *illegal logging*. Yang ketiga adalah membuat klasifikasi perkara berdasarkan anggaran. Ini supaya membantu kejaksaan untuk menyusun. Jadi misalnya dari laporan-laporan dari Kajari itu kemudian dibuat pendataannya supaya kemudian kejaksaan bisa merancang, berapa sih sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk itu.

Yang selanjutnya adalah perlu membangun system pencatatan laporan penanganan perkara di tingkat wilayah Kejari. Ada beberapa Kajari yang saya ajak bicara dan saya pahami Pak Kejaksaan Agung. Itu bahkan untuk menyelesaikan 1 perkara saja sulit.

Selanjutnya adalah perlu mengubah indicator keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Jadi indikatornya Bapak. Jangan sampai kemudian pernah kalau gak salah Pak Benny ya, kita pernah memikirkan ada diskresi. Bagaimana misalnya yang 50 Juta itu ya. Katakanlah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara 50 Juta mendapat diskresi penanganan. Sebab bayangkan saja, ada beberapa yang saya lihat 50 juta korupsi tetapi penanganannya menghabiskan 100 juta. Ya kan repot kalau kayak begitu.

Yang terakhir adalah penyelesaian secara jangka panjang termasuk menggunakan analisis ekonomi dalam penegakan hukum agar upaya penegakan hukum tidak lebih mahal dibanding tindak pidana yang barusan saya sampaikan tadi.

Nah untuk itu Pak Jaksa Agung ini catatan saya untuk mengenai dalam hal anggaran ini. Saya sampaikan bahwa sama sekali saya bukan Anggota Banggar dan sama sekali saya tidak tahu, bagaimana mekanisme ada di Banggar soal anggaran ini. Tetapi tentu saja saya harus memberikan catatan untuk ini.

Untuk itu demikian saya sampaikan Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Faisal terima kasih atas masukannya. Ini penting. Nanti kita diskusikan.

Selanjutnya kami persilakan.

PKS, silakan.

F-PKS (H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, SE):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Hari Senin ngomong angka-angka itu memang enak Pak. Hari kerja. Apalagi puasa, sambil nahan lapar. Kalau lapar kita hitungnya enak.

Angka 4 Triliun lebih sedikit ini psikologis Kejaksaan tidak menarik ini Pak sebenarnya. Tapi kalau lihat situasi ini antara semangat dengan kondisi negara yang lagi kronis cekak dan susah memang akhirnya jadi pengertian munculnya. Begitu Pak Benny. Jadi kita mau ngomong semangat nge-gas juga sulit Pak Taufiq. Saya bukan tidak mau bantu Pak Taufiq. Mau bantu ... Dan kalau soal membantu Insya Allah kita sama Kejaksaan darahnya merah-putih sama-sama Pak. Malah kalau menurut saya lihat keberpihakan hukum dari Pemerintah sendiri memang angka-angkanya masih minimize sekali. Terbukti ke Kejaksaan tidak ada angka mendesak, itu tidak ada. Ya buktinya kemarin begitu di *bloking* ada yang dapat reward, ada yang angka mendesak. Kejaksaan tidak ada mendesak. Padahal kita tahu kondisi kehidupan penegakan hukum juga khususnya ... dalam penuntutan ini ada di Kejaksaan. Kalau saya melihat ada satu hal yang penting Pak Kajagung soal SDM. Pembinaan SDM ini perlu mendapat perhatian yang serius sehingga pemahaman hukum dan pelaksanaan khususnya dalam etika moral Pak. Dalam perasaan, jangan rakyat itu menjadi sasaran atau mitra itu menjadi tekanan. Itu jangan. Janganlah jadi kejaksaan seperti itu. Saya tidak menyatakan itu apa adanya Pak. tapi fakta lapangan memunculkan Bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa? Pembinaan SDM inilah nampaknya angkanya perlu ditingkatkan dengan tim, dengan program mungkin yang lebih *up to date*, mungkin bisa ambil perbandingan dengan kejaksaan-kejaksaan dunia yang lebih bagus lagi. Saya tidak tahu nih Pak. Kejaksaan di dunia yang paling bagus siapa sih, negara mana? Mungkin kita bisa jadi ambil perbandingan. Diantaranya masalah SDM. Tadi 2 masalah pencegahan. Saya pikir cobalah masalah hukum di kita ini jangan pendekatannya kepada justru memancing untuk orang tertangkap atau untuk berbuat korupsi. Coba arahkan pencegahan termasuk kayak KPK juga, saya sudah ingatkan, polisi. Jadi pencegahannya itu harus kuat dalam masalah tindakan korupsi. Karena memang mencegah itu lebih baik daripada kita nangkap.

Yang selanjutnya, saya melihat kerjasama memperjuangkan angka ini di rancangan kerja Pemerintah yang baru saja kita selesaikan kemarin kayaknya perlu main tektok yang kuat Pak. Jadi kami-kami di Banggar yang jumlahnya Cuma. Pak Bambang berapa? 11 ya kira-kira, 8 ya. 8 kalau gak salah ya. Nah ini bisa berjuang dengan serius sehingga angka itu. Karena begini Pak? Di anggaran besar itu tidak mudah menambah angka-angka itu, kalau kita nambah angka kejaksaan berarti angka RKAKL lain pun

kepencet. Nah makanya, kalau menurut saya angka psikologis ini pantas kalau di 6 Triliun, padahal setahu saya dulu sempat 8 Triliun deh. Tapi kok makin kesini, makin turun-turun terus. Saya khawatir makin turun akhirnya kejaksan kerjanya jadi rusak secara individual. Khususnya dibawah Pak. Mungkin kalau di level-level atas ini masih bisa terseyyum. Tapi kalau sudah dibawah-bawah lapangan kerja ... itu lain sasarannya itu. Hal yang kecil-kecil itu jadi ... ke Jakarta. ... kenanya larinya ke Jakarta.

Pak Ketua,

Saya rasa singkat kata itu kita dari Banggar besar akan bekerjasama, berjuang untuk membantu mitra kami Pak. Insya Allah angka-angka ini, Cuma kalau bisa lebih detail lagi dalam kita berjuang ya Pak Jambin diforum nanti.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih banyak PKS. Mewakili Komisi III di Banggar ya. Ini suara partai oposisi di parlemen ya.

Selanjutnya oposisi lagi Fraksi Partai Gerindra.

Kami persilakan.

F-NASDEM (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH., M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Kejaksan Agung beserta seluruh jajaran,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Tidak ada hal yang baru yang ingin yang saya sampaikan hanya meng-*underline* saja beberapa pernyataan dari kawan-kawan. Tadi point penting saya kira tentang pendidikan dan pelatihan aparaturnya kejaksan. Di Sumatera Utara di Dapil saya Pak Jaksa Agung, ada Kajari, di Labuhan Batu ya. Yang ini kemudian sangat meresahkan. SKPD-SKPD yang ada di daerah itu mengeluh karena proyek-proyek yang langsung dari pusat yang tidak melalui APBD Labuhan Batu pun kemudian sasaran yang dia kejar itu adalah SKPD di Labuhan Batu. Saya sudah melaporkan itu kepada Kajati Pak Yusni. Tapi karena di awal kurang ditanggapi saya sempat laporkan juga kepada Komisi Kejaksan. Nanti namanya bisa saya beritahu tidak lewat sidang yang terbuka ini. Ini kan berarti ada integritas yang tergerus. Tapi saya tidak tahu apakah itu akibat dari anggaran yang sangat minim ini. Sehingga kemudian mereka berkreasi untuk bisa menyelesaikan tugas di embankan kepada mereka tapi dengan anggaran yang minim dengan cara melakukan hal-hal yang sebenarnya "tidak terpuji" itu. Jadi saya meng-*underline* itu soal program pendidikan dan pelatihan aparaturnya kejaksan yang memang saya lihat angkanya sangat minim sekali, 119 Miliar. Kayaknya ini memang perlu mendapat perhatian.

Yang kedua, saya kembali meng-*underline* apa yang disampaikan Pak Doktor ini Akbar Faisal soal *over capacity*-nya seluruh Lapas yang ada di Indonesia. Yang ini kita ketahui sangat berbanding terbalik dengan Lapas yang ada di Belanda. Yang kemudian Kejaksaan Agung Belanda sudah bingung, apakah Lapas-lapas ini menjadikan mall atau hotel dan sebagainya. Karena tingkat kejahatannya kemudian menjadi sangat menurun. Tapi memang ada system yang kita ketahui menyebabkan orang tidak terlalu banyak masuk kedalam Lapas. Apa itu? Dengan sebuah kebijakan memberikan denda ketimbang kemudian diproses secara panjang, seperti kata Pak Doktor Faisal tadi sehingga biaya prosesnya itu jauh lebih mahal dari kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yang bersangkutan. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa Kepala pengadilan dan juga beberapa Jaksa. Mereka mengusulkan memang. Sebenarnya bisa dibuat diskresi kalau itu belum masuk kedalam hukum positif yang berlaku. Untuk tingkat kejahatan dalam skala kerugian tertentu itu cukup biaya mengembalikan kerugian negara yang diambil sebelum ini. Sehingga kemudian ini tidak memperpanjang proses dan memperbesar pembiayaan dalam proses pemeriksaannya.

Kemudian juga yang menjadi *over capacity*nya lapas itu adalah kasus-kasus narkoba. Memang sudah menjadi kesepakatan bersama dari aparat penegak hukum bahwa penggunaan narkoba itu lebih di tetapkan sebagai korban yang kemudian akan dilakukan pembinaan. Tapi dalam prakteknya, kita melihat hampir semuanya itu ... ditetapkan menjadi pelaku kejahatan sehingga proses yang berlangsung untuk menuntaskan perkara yang sangat-sangat kecil dalam hitungan nol koma sekian gram dan sebagainya itu menghabiskan dana yang banyak dan pada gilirannya juga membuat *over capacity* Lapas dan juga akan menambah pengeluaran pembiayaan negara. Padahal masih bisa ditempuh dengan cara denda pembinaan dan yang setara dengan itu.

Mungkin ini yang paling saya garisbawahi Pimpinan. Pertama, tentang aparaturnya kejaksaan. Yang kedua, ada kebijakan untuk. Tidak semua persoalan sampai yang paling kecil harus diproses begitu panjang. Kalau memang bisa dilakukan kebijakan atau diskresi agar pengeluaran pembiayaannya tidak begitu besar tapi penyelesaian kasusnya bisa lebih efektif.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Gerindra.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA, SH., MH., MM):

**Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Komisi III,
Ketua Kejaksaan Agung dan seluruh staff.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera pada kita sekalian.

Sebelum saya memulai saran atau suatu pertanyaan. Saya perkenalkan dulu. Saya, nama Eddy Kusuma Wijaya. Nomor Anggota: A-207 dari Fraksi PDIP. Dapil Banten III.

Berkaitan dengan anggaran Kejaksaan Agung yang berkisar 4 T dan sudah juga dikurangi juga 10% berarti anggaran kita sekarang ini boleh dibilang sangat minim. Yang menjadi persoalan kenapa anggaran kita minim? Kian hari kian minim. Minim-minim-minim. Seperti negara kita ini kayaknya arah ke bangkrut atau arahnya kemana. Nah kalau kita melihat hal ini mungkin perlu kita mengadakan koreksi-koreksi terhadap program-program penegakan hukum karena saya melihat penegakan hukum kita kok terkesan biasa-biasa saja. Padahal kondisi negara kita kalau kita lihat dari anggaran ini sudah sangat gawat. Anggaran kok kurang-kurang-kurang. Nah mungkin didalam pelaksanaan penegakan hukum kita. Kita mungkin perlu ke arah prioritas-prioritas sasaran. Satu sasaran-sasaran utama karena ini juga berkaitan dengan anggaran, perlu kita ada sasaran-sasaran prioritas. Ini yang saya tidak lihat, baik itu di kejaksaan agung, di Polri, maupun di KPK sendiri. Mungkin kalau kita pelajari negara kita. Semua orang bilang, bahwa negara Indonesia ini kaya raya. Ada tidak, orang mengatakan Indonesia miskin. Mungkin tidak ada, baik itu pandangan orang luar, maupun pandangan kita semua mengatakan bahwa Indonesia kaya raya. Tapi kok anggarannya deficit-defisit-defisit.

Mungkin saran dari saya keterbatasan anggaran ini. Mungkin perlu ada sasaran prioritas di bidang penegakan hukumnya. Bukan BIN-nya dulu. Di bidang penegakan hukumnya. Karena apa? Yang perlu kita amankan itu adalah sumber masukan negara, baik itu sumber pajak, non pajak maupun hibah-hibah yang lain. Satu contoh saja, 1 orang Gayus dulu kita tangkap. Berapa Miliar uang terungkap. 1 Gayus. Yang golongan III, masih golongan sangat kecil di jajaran pajak, kita tangkap. Terbongkar uang itu besar sekali. Jangan-jangan banyak Gayus-gayus yang lain sehingga masukan negara ini tambah lama tambah kecil.

Jadi saran saya mungkin prioritas kita terhadap sumber-sumber kekayaan kita, baik itu sumber pajak, sumber non pajak, maupun yang lain. Ini yang perlu kita sasar dulu. Uangnya kemana ini. Kok orang mengatakan Indonesia ini kaya raya tapi kok uangnya tidak ada. Baru nanti kita kepada pengguna anggaran itu sendiri. Jangan sampai terkesan seperti contoh, mohon maaf ini menyinggung yang lain dulu KPK. Sasarannya kecil-kecil. Sasarannya mungkin jangan-jangan 50 juta, 100 juta ditangkap tangan OTT tapi yang bersifat strategis Triliunan uang ini kok sepertinya lupa-lupa saja. Sehingga kemarin ada anecdote yang bersifat kesalahan dari Kementerian Dalam Negeri. KPK itu kepanjangannya lain. Ini KPK.

Nah untuk itu prioritas kita kalau saran saya, yang pertama yaitu terhadap sumber-sumber anggaran itu, baik anggaran itu dari pajak, non pajak, maupun anggaran lain. Ini yang perlu kita sasar prioritas. Sedangkan yang lain itu sesuai dengan anggaran kita mungkin kita kesampingkan dulu sehingga ini ketemu benar ini. Dan sumber uang kita dimana. Waktu itu kami diskusi dengan, masih Abraham Samad. Sebetulnya dengan memanager gas dan minyak saja, uang kita ini banyak benar. Nah mungkin Bapak-bapak

tidak tahu letaknya kebocoran-kebocoran minyak sama gas. Nah ini perlu kita sasar hal-hal seperti itu sehingga masukan negara ini cukup besar. Kita bisa menambah nanti anggaran kejaksaan, bisa bangun gedung, menambah lagi yang lain, bisa bangun ini, bisa bangun ini. Tapi kalau melihat seperti sekarang dikurangi-dikurangi berarti kita ada deficit terhadap anggaran kita. Mungkin tambah kurang, tambah kurang, tambang kurang atau yang lain sebagainya.

Mungkin itu saran dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan tambahan PDIP.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan Komisi III dan rekan-rekan Komisi III,
Pak Jaksa Agung beserta jajarannya,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Melihat anggaran kejaksaan yang hanya 4,6 Triliun ini rasanya kami juga ikut miris ini Pak Jaksa Agung karena bagaimana aparat penegakan hukum ini anggarannya sangat minim sekali. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah disini Pak Jaksa Agung, perbedaan yang sangat mencolok antara penanganan perkara Pidum dengan anggaran yang 463 Miliar ini untuk menangani 116.000 perkara kurang lebih. Jadi 1 perkara itu hanya 4 Juta per perkara. Sementara anggaran Pidsusnya ini tindak pidana korupsi ini dengan angka yang lebih tinggi 360 Miliar menangani hanya 1058. Jadi kalau kita bandingkan perkaranya itu kurang lebih 300 juta per perkara. Jadi ini ada suatu angka yang jauh sekali perbedaannya. Ya mungkin karena Pidum itu Kejaksaan terima dari kepolisian sehingga ... tidak terlalu mahal segala macam, sementara kalau mungkin kalau korupsi kejaksaan menangani langsung dari ... sampai ... dan ininya. Satu itu.

Yang kedua, dengan anggaran seperti ini saya lihat ada program Simkarinya kejaksaan sepertinya akan hilang ini. Sementara Simkari ini kelihatannya cukup dibutuhkan dan Bapak dalam program ini sudah menyatakan bahwa ada semacam Simkari melalui realisasi *blueprint* untuk 2015-2019. Sedangkan di 2017 ini dengan anggaran seperti ini sepertinya terhenti program Simkarinya ini.

Mungkin itu yang saya tanyakan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Hanura?
Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH):

Terima kasih Pak Ketua.

Erma Ranik, Demokrat A-446 Kalimantan Barat.

Pak Jaksa Agung, beserta jajaran yang saya hormati,

Sampai siang ini tema kita adalah tentang RKA untuk 2017. Teman-teman di Kejaksaan Agung menganggarkan ada 4,6 Triliun untuk RKA Tahun 2017. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Jaksa Agung hanya pendalaman saja. Hari ini ada 2 koran nasional yang memuat berita yang sesungguhnya sangat mencemaskan kita semua. Bagaimana kondisi keuangan negara kita sedang darurat. Nah tentu saja kita paham bahwa darurat kondisi keuangan ini karena digenjotnya begitu banyak project infrastruktur yang cenderung melupakan teman-teman di bidang penegakan hukum. Salah satunya adalah institusi kejaksaan agung.

Saya tidak akan bicara RAPBN 2016 karena bukan forumnya disini Pak Jaksa Agung. Dalam RKA 2017 mendatang ini, saya ingin tanyakan apakah teman-teman masih memakai asumsi yang sama ketika membuat RKA ini yang sama ini maksud saya ketika RKA 2016 disusun pada masa 2015 tahun lalu. Kenapa saya ingin tanyakan ini karena dugaan saya imbas dari darurat keuangan negara ini juga akan berdampak pada teman-teman di Kejaksaan Agung. Tadi senior saya Pak Habib sudah jelas mengatakan bahwa kita ingin mendukung teman-teman di Kejaksaan Agung ini supaya bisa mendapatkan anggaran yang cukup. Tetapi saya tidak merasa bahwa Pemerintah ini akan memiliki *concern* yang sama dengan kami dibanding dengan *concern* untuk mengerjakan project-project infrastruktur.

Nah saya ingin tanyakan kepada Pak Jaksa Agung, dengan asumsi 4,6 Triliun ini kalaulah ada pemotongan di Tahun 2017 nanti, kalaulah ini. Asumsi saya sekitar 10 sampai 15% akan dipotong. Kira-kira bidang atau program mana yang menurut Pak Jaksa Agung yang harus direlakan untuk dipotong di institusi kejaksaan.

Yang kedua Pak Jaksa Agung, menarik. Saya membaca sekilas saja ini paparan Pak Jaksa Agung di halaman 32. Satu inisiatif yang menurut saya sangat bagus ada di program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ada niat teman-teman di Kejaksaan Agung untuk membuat implementasi pilot project system peradilan pidana terpadu berbasis IT di 5 kejaksaan tinggi dan 5 kejaksaan negeri. Saya merasa ini sangat maju pikirannya, sangat baik. Saya ingin mendapatkan gambaran yang singkat saja Pak Jaksa Agung, kira-kira ini nanti mau dibawa ke arah mana ini, 5 Kejaksaan Tinggi, 5 Kejaksaan Negeri akan jadi pilot project system peradilan pidana terpadu. Dugaan saya ini soal transparansi dan akuntabilitasnya yang akan diutamakan. Nah kalau ini akan benar-benar di implementasikan. Semoga ini tidak menjadi bagian yang akan dipotong di Tahun 2017.

Ketiga Pak Jaksa Agung soal pidana mati. Tadi disampaikan oleh Pak Jambi soal akan ada rencana eksekusi. Koreksi saya kalau saya salah Pak. Rencana eksekusi 30

terpidana mati di Tahun 2017. Sebegitu mendesakkan eksekusi ini dilaksanakan. Sehingga nilai orang yang akan dieksekusi ini begitu tingginya Pak. Jadi mohon penjelasan. Saya tidak menghubungkannya dengan anggaran walaupun itu pasti berhubungan dengan anggaran. Karena kalau mau mengeksekusi seorang terpidana mati tentu saja membutuhkan banyak sekali anggaran sesungguhnya.

Terakhir Pak Jaksa Agung, dalam reses lalu saya berkunjung ke Kejaksaan Negeri Singkawang Pak Jaksa. Ada satu keluhan yang menarik yang disampaikan oleh jajaran kejaksaan negeri Singkawang. Yang saya pikir juga mewakili 13 kejaksaan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Yang pertama itu, ini soal manajemen saja Pak. Saya menduga ada ketidaktransparanan manajemen dalam system pemindahan jaksa-jaksa yang ada di institusi kejaksaan. Ada Jaksa yang sudah 4 sampai 5 tahun di posisi yang sama. Padahal mekanisme pemindahan Jaksa tidak lama-lama di satu posisi itu kan niatnya baik. Nah dengan apakah teman-teman di Kejaksaan punya system manajemen yang baru nih Pak soal penempatan aparatur Kejaksaan di Kabupaten dan Provinsi. Lalu yang kedua, ini juga terkait dengan anggaran Pak Jaksa Agung. Jaksa pengacara negara ini ternyata dikeluhkan tidak ada anggaran Pak Jaksa Agung. Jadi mereka bekerja saja di Kejaksaan Negeri Singkawang itu ada 3 kasus yang ditangani kalau saya tidak salah terkait dengan gugatan institusi negara. Ini teman-teman di Kejaksaan Singkawang yang tangani. Tetapi anggaran untuk mereka dari institusi kejaksaan untuk menangani kasus tidak ada Pak. Nah ini bagaimana gambarannya kedepan terkait RKA 2017.

Saya kira 4 point itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih banyak.

Apa masih ada?

Kalau tidak ada kita cukup dululah. Dari meja Pimpinan. Sebelum saya serahkan kepada Pak Jaksa Agung. Jadi itu tadi disampaikan oleh teman-teman, fraksi-fraksi berkenaan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2017. Saya hanya dari meja Pimpinan, kami hanya ingin menegaskan supaya untuk 2017 ada prioritas. Dipertajam prioritasnya itu. Sejalan dengan program umum pemerintahan Jokowi, pemerintahan SDM dalam rangka revolusi mental kita ingin tahu lebih detail program dan anggarannya untuk itu.

Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa jantung penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan korupsi ada pada Kejaksaan Agung. Itu harus kita catat itu Pak. Munculnya KPK karena ada asumsi. Kejaksaan agung ini, kejaksaan ini tidak. Apa istilah halusnya ini. Pak Faisal, istilah halusnya apa Pak. Oleh sebab itu mestinya ada kompetisi, sehat, kejaksaan dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi ini. Nah saya tidak melihat itu didalam Rencana Kerja Pemerintah, Kejaksaan Agung untuk 2017. Oleh sebab itu dulu Pak Faisal Akbar bukan 50 Juta. Kita usulkan 1 Miliar setiap Kabupaten/Kota untuk pembenahan SDM sekaligus pemberantasan, pencegahan, penindakan korupsi ini. Kalau ada 500 Kabupaten/Kota kali 1 M kan Cuma 500 M Pak. Saya yakin bisa. Cuma 500 M Pak. Oleh sebab itu, saya yakin teman-teman Komisi III sangat mendukung kalau Kejaksaan Agung mengalokasikan tambahan 500 M.

Dialokasikan setiap Kabupaten/Kota 1 M khusus untuk 2 isu utama tadi. Pembinaan SDM, Kejaksaan tadi, jaksa-jaksa supaya tadi jangan ada cerita Jaksa naik ojek, kan begitu Pak. Jaksa kost, dimana tempat kost.

Dan yang kedua, dana itu untuk pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun dalam konteks penindakan. Bisa itu Pak. Jadi tugas Bapak Jaksa Agung sama. Jambidsus itu ya pantau itu dilapangan. Lalu nanti kita bisa evaluasi akhir tahun ini loh hasilnya. Sehingga tidak ada lagi cerita, Jaksa ikut tender-tender project. Main-main dengan kasus. Jadi OTT, KPK, kan lucu kita ini. Bukan kejaksaan yang melakukan OTT tetapi kejaksaan yang dijadikan target OTT Pak Taufiq. Kejaksaan jadi target OTT. Oleh sebab itu, saya yakin Bapak/Ibu Anggota Komisi III setuju Pak ini. 1 Miliar setiap Kabupaten, tambahan Cuma 500 tadi. Kalau tadi totalnya 4,6 ya tambah 500 lagilah. 5 M, 5 Triliun. 5 Triliun dia. Bisa. Kalau Bapak/Ibu di Kejaksaan Agung punya komitmen kolektif soal ini saya yakin bisa akan ada mental evolution disetiap Kabupaten itu Pak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Presiden Jokowi. Kita dukung itu. Kita mendukung. Jadi partai-partai pendukung Pak Jokowi tidak mengusulkan itu, kami partai penyeimbang mengusulkan itu. Kadangkala teman-teman karena sudah dekat di dalam kan tidak bisa melihat Pak Taufiq, lupa. Ya mungkin ada manfaatnya kami sebagai penyeimbang ini untuk mengingatkan ini yang Bapak/Ibu lupa.

Sekarang pukul 12.30 kita perpanjang 10 menit untuk *closing*-nya Pak Jaksa Agung nanti khusus untuk isu ini. Lalu nanti kita brake jam 12.35 untuk kita mulai lagi pukul 14.00. Khusus untuk ini saja dulu.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE.,M.Si):

Masih ada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh ada PAN. Tadi lupa saya lupa ya Fraksi PAN, apa belum datang. Makanya tadi saya tanya, apa masih ada. Karena tidak ada ya saya.

Kalau begitu saya perpanjang lagi 15 menit ya.
12.45, jangan lama-lama Pak.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE.,M.Si):

Sedikit saja Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Jaksa Agung dan jajarannya,

Sebetulnya tadi sudah banyak tadi diungkapkan oleh teman-teman di Fraksi berkaitan bagaimana sebetulnya kejaksaan agung mampu melakukan akselerasi atau percepatan dalam proses perbaikan di internal sehingga Kejaksaan Agung mampu betul-betul menjadi lembaga utama penegakan hukum di Republik ini. Saya cukup menggelitik dan tertarik berkaitan persoalan-persoalan yang terjadi di Kejaksaan Agung. Pertama adalah sesuai Peraturan Presiden. Ini sebagai landasan dulu saya berbicara kontek tentang bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Peraturan

Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017, arah kebijakan Pemerintah kepastian dan penegakan hukum. Ini menjadi catatan buat kita bersama. Ini ada semangat, keinginan bagaimana ... ini memberikan arah dan kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum dinegara ini. Persoalannya adalah satu dan satu sisi ada semangat Pemerintah ingin melakukan suatu arah kebijakan dan program yang betul-betul yang tujuannya adalah melakukan proses perbaikan-perbaikan didalam internal penegakan hukum di kita. Bukan hanya di Kejaksaan, di kepolisian, dan di penegak hukum lainnya. Tapi persoalannya adalah ini berbanding terbalik dengan bagaimana Pemerintah berbicara konteks sector anggaran. Saya ingin melihat struktur APBN kita. Sebetulnya kan jelas dalam penyusunan APBN itu sumber pendapatan kita dari sector pajak, non pajak, lain-lain dan sumber pendapatan lainnya terhimpun melalui sumber pendapatan. Dan ini terestimasi sebenarnya. Terhitung. Tapi ketika kami belajar bahkan tadi saya dengar Bu Erma bicara andainya 2017 dipotong lagi 15% atau 20% bagaimana? Ini kan jadi lucu sebenarnya. Anda bisa bayangkan, semua bisa bayangkan. Ketika semua program ini tersusun dalam bentuk. Ya jujur saja buat saya penegakan hukum kejaksaan se-republik ini dari Sabang sampai Merauke jumlahnya 4,6 Triliun. 8 program. 8 program adalah implementatif dari kebijakan Perpres tadi Nomor 45. Harusnya kan nyambungnya kesana. Karena persoalannya adalah apakah ini mampu dilakukan oleh kejaksaan. Ketika misalnya, program ini sudah tersusun tiba-tiba karena pendapatan negara kita, estimasi pendapatan kita tidak sesuai target. Tidak sesuai target karena ada sesuatu yang luar biasa atau memang estimasi kita terlalu over target. Kayak dulu saya pernah protes pertumbuhan kita 5,6% sampai 6%. Saya bilang omong kosong itu. Moderatnya saja 5,2, 5,1 ya memang terbukti sekarang 5,3 saja dipotong menjadi 5,1%.

Nah persoalan seperti ini sebetulnya. Ini akar persoalan di internal kejaksaan. Kalau berbicara bagaimana mampu melakukan perbaikan di internal kejaksaan itu harus berbasis anggaran. Saya selalu berbicara 4 konsep. Keberpihakan Pemerintah terhadap akselerasi atau percepatan perbaikan dalam internal lembaga apa pun di negeri ini. Pertama, ada niat baik Pemerintah untuk melakukan perbaikan itu. Kedua, saya bilang bagaimana Pemerintah melakukan perbaikan sumber daya manusia. Ketiga, ada strategi. Yang Bahasa tadi Bang Faisal tadi ada akrobatik. Yang tidak Cuma rutinitas, kayak rapat sekarang buat saya. Besok nanti 2017 rapat kita akan ketemu dengan hal-hal yang sama.

Yang keempat adalah bagaimana Pemerintah berbasis pada anggaran. Jadi saya pikir begini, bagaimana mungkin melakukan perbaikan terhadap kasus-kasus hukum. Ini biaya perkaranya sekian perkara. Ternyata kejaksaan mampu menyelesaikan lebih dari perkara itu. Pertanyaan, kalau itu dilakukan proses audit, apakah total biaya perkara dibagi jumlah perkara sama dengan itu biaya perkara dan seada-adanya misalnya. Dan ini yang terjadi sebetulnya persoalannya. Substansinya disitu, ketika perkara ini seada-adanya dan kasus berapa pun kan kejaksaan saya pikir juga tidak mungkin memprediksi berapa perkara yang masuk. Bisa saja dalam satu tahun bisa tiba-tiba dan harusnya kejaksaan mampu menyiapkan anggaran itu. Jadi jangan sampai terjadi persoalan hukum di kita menyelesaikan perkara hukum, biaya hukumnya akan dilakukan seperti istilah menggoreng ikan dengan minyaknya. Jadi karena perkara itulah yang membiayai perkara itu. Ini yang menjadi persoalan.

Nah harapan saya, kaitan dengan Perpres ini. Apakah dari program prioritas sebagaimana diarahkan dalam Perpres Nomor 45 tadi 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017 sudah pernah dilakukan oleh Kejaksaan. Dan kemungkinan kendalanya apa. Kedua, ini catatan juga Pak. Satu sisi kita ingin memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat kita tapi 1 sisi tadi saya bilang ada penghentian pembangunan kantor Kejaksaan infrastruktur dan lain-lain. Saya pikir ini kan anomaly juga. Satu sisi memberikan pelayanan, terus kita juga tidak punya tempat. Kan lucu. Bahkan tidak layak. Ada beberapa wilayah yang punya Kabupaten, mungkin Kajarinya juga gak punya kantor atau belum punya. Belum punya Kajari. Nah ini persoalan juga. Bagaimana mungkin tujuan pelayanan sesuai dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 itu mampu dilaksanakan ketika kita anomaly terhadap kebijakan seperti itu.

Itu saja Pak Ketua catatannya.
Terima kasih.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih.
PKB.

F-PKB (HJ. ROHANI VANATH):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Ketua Komisi III beserta Anggota Komisi,
Yang saya hormati Jaksa Agung beserta jajarannya,**

Terkait dengan anggaran mitra Komisi III yaitu Kejaksaan Agung 4,6 Triliun. Prinsipnya negara telah mengalokasikan anggaran pada kejaksaan agung dan mitra Komisi partai Pemerintah yang mendukung. Otomatis dari Fraksi PKB juga mendukung, Pemerintah yang oposisi saja mendukung apalagi kita mitra dengan partai Pemerintah. Cuma catatan saya disini yaitu terkait dengan moratorium pembangunan kantor-kantor Kajari di wilayah nusantara Indonesia beberapa wilayah, itu saya punya catatan sendiri. Dapil Maluku itu 10 tahun. Suami saya waktu itu sebagai Bupati telah menghibahkan sebidang tanah buat Kajari dan sampai sekarang pun juga belum bisa dibangun kendalanya yaitu terkait dengan anggaran. Nah jika itu moratorium pembangunan Kajari, mungkin kami punya catatan bahwa, mungkin dipikir-pikir dulu karena untuk pembangunan kantor-kantor Kajari ini sangat penting terkait dengan otonomi daerah. Karena pelayanan hukum buat daerah-daerah pemekaran otonomi itu sangat penting.

Yang berikutnya terkait dengan eksekusi mati tahap ke-3 serta pelayanan public hukum di instansi-instansi lain itu mungkin bisa di prioritaskan karena merupakan. Eksekusi mati tahap ke-3 itu perlu dilaksanakan dan terkait dengan pengguna anggaran

juga sebaiknya pemangkasan yang lebih diprioritaskan. Yang tidak diprioritaskan mungkin itu sebaiknya ditunda. Mungkin itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih banyak.

Ini sudah pukul 12.45. Saya usul kita brake dulu, lalu nanti Pak Jaksa Agung sekaligus menyampaikan penjelasan soal karena ini masukan-masukan.

Kami persilakan Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI:

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih, kami telah banyak sekali mendapatkan masukan. Yang kami dengar dan catat tadi semuanya memahami tentang betapa terbatasnya anggaran kejaksaan. Bahkan dikatakan dari waktu ke waktu termasuk Pak ... mengatakan apakah kejaksaan itu stagnan. ... atau tidak punya inovasi. Sebenarnya kami ada inovasi-inovasi Pak Hasrul. Sebagaimana yang kami sering sampaikan bahwa di semester I ini pun kami sudah membentuk satu tim. Tim pengawal dan pengaman ... pembangunan (TP4) baik pusat dan daerah. Ini juga satu pemikiran dimana tentunya harapan kita dengan tim kita ini akan semakin mendorong keberhasilan ... pembangunan. Dan ini kami nilai ini suatu program yang sangat strategis meskipun saya juga ingin sampaikan bahwa untuk program strategis ini pun tidak didukung oleh anggaran sama sekali. Jadi kita memanfaatkan anggaran yang ada dan alhamdulillah dengan tertatih-tatih kami bisa melaksanakan apa yang sudah kami programkan ini. Dan ini tentunya nantinya untuk penyusunan untuk tahun anggaran yang tahun akan datang rasanya kami akan mohon dukungan dari teman-teman mitra Komisi III ini untuk mendukung kita.

Bukan hanya itu Pak, kami juga membentuk Satgasus. Penanganan dan tindak pidana korupsi. Kami merekrut jaksa-jaksa dari daerah, jumlahnya 100 Jaksa. Kita tempatkan di Jakarta. Itu pun tanpa membebani anggaran tambahan dari Pemerintah. Dan Alhamdulillah hasilnya cukup signifikan dan ini pun tentunya bentuk dari dedikasi kejaksaan terhadap bangsa ini. Kami juga menyelenggarakan program baru yang kami kenal dengan Jaksa masuk sekolah. Ini kami kerjakan untuk memperluas obyek sasaran dari program selama ini yang ada yaitu dulu yang Bapak sampaikan Jaksa masuk desa dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum khususnya untuk mereka yang berusia dini melalui Jaksa masuk sekolah ini.

Kami juga berterima kasih atas segala rekomendasi yang hampir semuanya tadi Anggota Komisi III yang sempat menyampaikan pendapatnya, semuanya hampir berupa rekomendasi. Rekomendasi yang isinya adalah dukungan dan kesediaan untuk mendukung dan membantu kejaksaan untuk meningkatkan anggaran yang memang sangat-sangat terbatas ini. Rekomendasi tentang saran, solusi tentang penanganan perkara, bagaimana menangani over capacity. Pendidikan etika moral, peningkatan

intensitas kinerja untuk menjadi *leading sector* sebagai sentral penegakan hukum khususnya beralaskan korupsi. Dan tentunya ini semua bukan kapasitas kejaksaan sendiri untuk bisa mengatasi Bapak/Ibu sekalian. Karena ini nanti akan terlihat dengan masalah regulasi, masalah pembiayaan, masalah fasilitas lain-lain yang tentunya nanti kita perlu bahas bersama. Yang pasti bagaimana pun dari saat ke saat kejaksaan ... dan memiliki obsesi untuk bagaimana meningkatkan kinerja, kualitas, dan kapasitas dalam penanganan atau pelaksanaan Tupoksinya.

Mengenai eksekusi mati, memang sekaligus saya katakan ini memang suatu tugas yang menyenangkan tapi harus kita laksanakan. Untuk tahun ini sebenarnya siap anggaran 18 terpidana mati. Hanya perlu kami laporkan bahwa kalau pun agak sedikit tertunda pelaksanaannya itu karena ada beberapa factor penyebab. Tapi penyebab utama adalah bahwa kami punya suatu pemahaman bahwa eksekusi mati nanti akan sedikit mengganggu upaya kita untuk memperbaiki sector ekonomi. Sehingga dengan demikian sector ekonomi yang harus diperbaiki adalah merupakan skala prioritas diluar masalah-masalah ini sebenarnya prioritas.

Kejaksaan Pak Pimpinan dan Anggota Komisi III sangat memahami betapa kemampuan dan ... Pemerintah sekarang ini yang tentunya masih perlu perbaikan. Tentunya kalau kita kaitkan dengan kita negara hukum ... harus jadi ... Dan saya berpikir bahwa pandangan hukum adalah merupakan suatu factor yang cukup signifikan untuk mendorong keberhasilan dari program apa pun khususnya pembangunan nasional di negeri kita ini. Karenanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas komentar, dukungan pendapat, saran, solusi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi III dalam Rapat Kerja ini dalam kaitan upaya untuk meningkatkan anggaran. Rasanya tadi ada yang menyampaikan bahkan kalau perlu bagaimana supaya anggaran kita, Kejaksaan bisa 6 Triliun, 7 Triliun, 8 Triliun. Kami juga tidak terlalu muluk-muluk tapi yang penting apa pun program yang ada itu bisa dicover dengan anggaran yang ada sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dan mungkin kejaksaan akan bisa berkiprah lebih leluasa ketika akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Itu mungkin Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang kami hormati dan kami muliakan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas simpati, dukungan dan tentunya dorongan-dorongan semangat yang nantinya akan dapat kami jadikan sebagai bekal bagi jajaran kejaksaan untuk meningkatkan intensitas kerjanya. Meskipun dengan anggaran yang masih sangat minim dan perlu diperjuangkan untuk bisa ditingkatkan.

Demikian.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Agung atas penjelasan, klarifikasi sejumlah pertanyaan tadi. Untuk kesimpulan nanti kita akan sampaikan setelah kita akan lanjutkan dengan rapat yang berkenaan dengan pengawasan tadi. Pukul 14.00 kita mulai sampai selesai. Jadi kita akan istirahat. Kami akan mulai lagi pukul 14.00 ya? Jadi kita istirahat 1 jam 10 menit.

Kita skors selama 1 jam. Sampai jumpa pukul 14.00 tepat kita mulai.

(RAPAT DI SKORS)

Jaksa Agung yang kami hormati,

Sesuai dengan kesepakatan tadi kita mulai pukul 14.00. Sekarang sudah pukul 14.30 maka seijin Bapak/Ibu sekalian skors saya cabut dulu lalu kita lanjutkan.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Baik. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Sebelum pukul 13.00 kita khusus membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Sekarang kita lanjutkan Rapat Kerja yang berkaitan dengan pengawasan. Kita mohon persetujuan Bapak/Ibu sekalian dan Jaksa Agung kita akan akhiri rapat ini pukul 16.00. Kalau bisa diusahakan hemat kata dan hemat kalimat. Setuju Pak ya, pukul 16.00 kita.

(RAPAT : SETUJU)

Baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Jaksa Agung untuk menyampaikan. Mungkin *highlight* saja Pak. Hal-hal yang penting yang ingin disampaikan. Demikian juga nanti Bapak/Ibu sekalian sebelum menyampaikan hal-hal yang ... (suara tidak jelas).

Kami persilakan.

JAKSA AGUNG RI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Yang saya hormati Bapak Trimedya Panjaitan yang baru hadir,
Para Anggota Komisi III yang saya hormati dan muliakan pula.**

Jadi giliran saya untuk menyampaikan kembali tentang hal yang diminta oleh Rapat Kerja ini yaitu yang berkaitan dengan evaluasi kinerja kejaksaan semester 1 Tahun 2016. Kami ... yang disampaikan tadi sudah membuat laporan lengkap ... masalah yang dikehendaki dan ... karenanya kiranya mohon dapat menyampaikan pokok-pokoknya sebagai bahan ... Selanjutnya guna mendapat saran pendapat, komentar dan tanggapan dari Komisi III.

Peserta rapat dan para hadirin sekalian yang saya hormati,

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang ... menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan juga berwenang melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain perkara pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan disisi lain dibidang pidana. Kejaksaan juga memiliki kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara serta dibidang ketertiban dan keamanan umum,

ketentraman umum. Terkait evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, tidak terlepas dari tema rencana kerja Pemerintah Tahun 2016 yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas. Bila diperhatikan secara umum dan selintas mungkin dapat dipandang sebagai tidak memiliki hubungan keterkaitan secara langsung dan konkrit dengan penegakan hukum. Namun saya berpendapat bahwa upaya penegakan hukum mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat positif bagi membaiknya dukungan atas keberhasilan pembangunan. Kejaksaan yang disamping melakukan penegakan hukum represif juga memandang penting pula untuk penegakan hukum preventif atau pencegahan. Inilah yang menjadi penekanan kebijakan penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia saat ini. Tadi dikatakan oleh sementara Anggota Komisi III nanti bahwa mencegah akan lebih baik daripada mengobati atau menindak. Dan dengan demikian kita juga berharap dalam penegakan hukum ini tentunya menghindari dan tanpa membuat pihak lain merasa takut sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tenang.

Disisi lain saat ini kita tahu bersama bahwa masyarakat dunia sedang menghadapi era kompetisi, persaingan, persaingan global. Untuk itu tentunya saya memandang Indonesia harus kuat dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Harus ... dengan baik dan harus berhasil. Semua elemen bangsa, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif, seluruh komponen, dan instrument pemerintah negara dan segenap warga masyarakat diharapkan hendaknya dan harus berpartisipasi, berkontribusi dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Dan untuk ini tentunya kami dengan Kejaksaan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan. Demi keberhasilan dan demi tercapainya maksimal program pembangunan yang sedang diselenggarakan. Kami melihat bahwa kepastian dan efektivitas ... dengan hukum merupakan factor dominan yang mempengaruhi kemampuan daya saing, minat investasi, dan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sector pariwisata dan industry maupun maritime.

Oleh karenanya guna mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah tersebut kejaksaan berupaya melaksanakan penegakan hukum yang tidak tebang pilih tanpa diskriminasi dan disvarietas. Tentunya ini dimaksudkan guna meningkatkan kepercayaan para pelaku bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Memprioritaskan dan tidak mengabaikan tentunya pemberantasan korupsi. Ini semua tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 001/A/JA tentang rencana kerja kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016. Nah ini merupakan jabaran rencana strategis kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 sampai 2019.

Berikutnya saya menyampaikan capaian kinerja masing-masing bidang di kejaksaan untuk semester 1 2016 bidang pembinaan. Saya ingin menyampaikan bahwa bidang pembinaan adalah merupakan satuan tugas pendukung. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan penanganan perkara dan tugas teknis tapi bidang pembinaan memiliki peran strategis antara lain dalam penataan personil, mengupayakan pemenuhan kebutuhan operasional, infrastruktur dan lain-lain. Sementara capaian kerja bidang binaan antara lain yaitu selaku penegak hukum, jaksa penuntut umum dan eksekutor yang mewakili korban kejahatan masyarakat dan negara, sesuai dengan asas ... kejaksaan menjadi pusat pemulihan asset (*center of asset recovery*) terutama dari kejahatan korupsi. Dari Januari sampai dengan Mei 2016 nilai asset yang ditangani pusat,

... asset kejahatan agung Indonesia sebesar ... dan mulai Perpres Nomor 29 '2016 tentang perubahan atas Perpres 38 '2010 tentang koordinasi dan tata kerja kejaksaan. Alhamdulillah Presiden, Pemerintah telah menyetujui untuk pengangkatan kembali jabatan structural Eselon V di Kejaksaan Negeri dan eselon IV di Kejaksaan Tinggi dan Agung untuk jabatan Eselon V dan IV tugas teknis. Dengan demikian diharapkan nantinya pelayanan terhadap pencari keadilan akan lebih bisa ditingkatkan tanpa harus menambah beban negara. Karena nanti yang duduk di Eselon V dan IV ini adalah para Jaksa yang mereka memiliki tunjangan fungsional.

Kemudian pembinaan dan kami juga menerbitkan Jaksa Agung Nomor keputusan 283/A/JA/05 '2016 tentang koordinasi dan tata kerja kejaksaan yaitu pembentukan kejaksaan negeri daerah pemekaran di 9 daerah pemekaran. Tentunya kita membentuk 9 kejaksaan negeri pula yaitu Mojokerto, Bombana, kepulauan Siau Tagulandang, Biaro, Saboraijua, Halmahera Barat, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, Panukao, Abab Lematang Hilir dan diharapkan dengan demikian akan lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. ... kejaksaan agung Nomor: Kep.349A/JA/05 '2016 tentang perubahan nama Kejaksaan Negeri yaitu menyesuaikan nama Kabupaten/Kota dimana kejaksaan negeri itu berkedudukan. Sebab dengan demikian ... kejaksaan negeri yang berdampingan di daerah pemekaran tersebut tidak mengalami *over laping* dan lebih jelas. Kemudian capaian kinerja di bidang intelijen. Saya ingin sampaikan bahwa intelijen kejaksaan adalah merupakan bagian dari intelijen negara. Dia masuk ke jajaran intelijen komoditi. Memiliki fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Namun berbeda dengan intelijen TNI yang lebih kontra intelijen. Intelijen kejaksaan adalah law intelijen. Mendukung keberhasilan operasi ... Saat ini inteilijen kejaksaan disamping tetap diarahkan untuk mendukung keberhasilan operasi ... juga untuk mengawal dan mendukung pengamanan pelaksanaan pembangunan nasional. Dan untuk kepentingan dan tujuan utama tersebut Jaksa Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah membentuk tim pengawal dan pengaman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang kita kenal dengan TP4 baik di pusat maupun daerah. Pada periode Tahun 2015 sampai dengan Mei 2016 begitu banyak, baik Kementerian, lembaga, dinas dan instansi serta BUMN, BUMD yang telah menjalin kerjasama meminta pendampingan kepada TP4P dan TP4D.

Dan dengan TP4 yang kami bentuk telah mendapatkan begitu banyak apresiasi karena serapan anggaran menjadi normal dan tinggi sementara para pejabat daerah tidak lagi takut untuk salah karena sering kali kesalahan yang mereka lakukan karena ketidaktahuan dengan cara TP4 mendampingi program-program pemerintahan baik pusat maupun daerah sejak awal tapi tidak untuk mencampuri hanya sekedar memberikan pencerahan dan pengarahan tentang mekanisme, prosedur dan tata cara yang benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian tentunya kami tetap menjaga agar TP4 ini tidak dijadikan sebagai banker (tempat berlindung) dan tidak dijadikan sebagai alat untuk menjadi alasan pemaaf. Kami juga telah melaksanakan program Jaksa masuk sekolah seperti kami laporkan tadi dalam bentuk penyuluhan dan penanganan hukum dengan sasaran sekolah-sekolahan baik SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dengan maksud memberikan pengenalan hukum karena hal-hal lain sejak usia dini dan kami dalam pelaksanaan JMS ini melibatkan berbagai pihak stakeholder, sesuai dengan kebutuhan dan topik yang akan dibicarakan.

Dengan demikian kita berharap agar anak-anak muda mengerti, memahami, patuh dan taat pada hukum. Nah ini tentunya penting untuk mengingatkan peran mereka sebagai kelak penerus dan pelanjut kehidupan bangsa dan negara kita.

Pada era Januari sampai Mei 2016 Jaksa masuk sekolah telah dilaksanakan di 15 sekolah dasar, 87 sekolah lanjutan tingkat pertama, 225 sekolah lanjutan tingkat atas, 4 perguruan tinggi dan dihadiri 74.687 peserta. Dan ini dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan diseluruh Indonesia dan kita berharap tentunya ini akan memberikan manfaat bagi upaya kita untuk meningkatkan ... masyarakat sejak usia dini meskipun semua program ini baik TP4, Jaksa masuk sekolah, dan Satgasus pun sampai saat ini tidak harus memberikan beban pada keuangan negara. Intelijen juga meningkatkan intensitas penggunaan alat yang dimiliki yaitu alat sadap melalui Adiyaksa monitoring center. Hanya saja penggunaan alat sadap oleh kejaksaan berbeda dengan yang diberikan kewenangan kepada KPK dimana KPK bisa menggunakan alatnya setiap saat, kapan pun dan setiap tahapan penanganan perkara. Sementara Kejaksaan baru akan menggunakan alat sadapnya ketika perkara sudah ditingkat penyidikan. Karenanya yang menjadi sasaran untuk pengoperasian alat sadap ini adalah untuk menangkap dan mengamankan para buron dimana dari Januari sampai dengan 10 juni 2016 ini AMC kejaksaan telah berhasil mengamankan 31 buron, baik tersangka, terdakwa maupun terpidana. Kami punya moto bahwa tiada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan atau koruptor.

Kemudian intel juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan terhadap masyarakat. Dan disini tergabung dalam Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan dalam masyarakat). Dimana tanggal 29 Februari 2016 yang lalu telah mengeluarkan surat keputusan bersama, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung untuk melarang penyebaran ajaran sesat oleh mantan pengurusnya yaitu pengurus Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) dengan pimpinannya Saudara Tumanurung dan Ahmad Musadek. Dan pelarangannya ini pun didasarkan adanya fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa ajaran Gafatar adalah ajaran sesat yang harus dicegah untuk disebar.

Kemudian berikutnya, capaian kinerja bidang Pidum. Pidum menangani perkara yang disidik oleh penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil lain antara lain dari KKP, dari kehutanan dan lain-lain. Dan disini tentunya tugas Pidum berawal dari penelitian berkas perkara yaitu melakukan pra penuntutan. Dan saya ingin sampaikan bahwa disamping ... untuk nanti berakhir ke penuntutan dan persidangan untuk putusan pengadilan. Terakhir adalah kunci keberhasilan dari penuntutan. Sering kali masyarakat melihat adanya kesan bolak baliknya satu perkara untuk diteliti sehingga ada tuduhan bahwa Kejaksaan mempersulit penyelesaian perkara Pemilihan Umum atau bertele-tele ... gunanya justru ... yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh ini untuk nantinya diharapkan akan memberikan hasil maksimal bagi ... di persidangan. Di periode Januari sampai Mei 2016 ... yang diterima oleh Kejaksaan sebanyak 70.746 perkara sementara penyerahan tahap pertama untuk diteliti sebanyak 69.642 perkara. Dikembalikan berkasnya kepada penyidik sebanyak 10.181. Jadi sekitar 7% saja yang dikembalikan untuk disempurnakan. Dan penuntutan yang dilakukan sebanyak 60.111 perkara. Sementara jenis tindak pidana-pidana umum yang terbanyak umum adalah perkara narkoba, kemudian juga perlindungan terhadap anak, illegal logging, kekerasan terhadap perempuan, perkara perikanan dan perkara pembakaran hutan dan lahan.

Beberapa catatan yang perlu kami sampaikan disini berkenaan dengan hal-hal yang memiliki potensi dan keterkaitan dengan kinerja Pidum antara lain adalah adanya surat pernyataan dari pengurus besar IDI tentang keberatannya untuk menjadi eksekutor atau untuk membantu eksekusi pelaksanaan kebiri. Sementara berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang hukuman tambahan terhadap kejahatan, kekerasan terhadap anak, hukuman kebiri, cip dan publikasi adalah merupakan tambahan hukuman yang diharapkan akan membuat para pelakunya jera dan bisa membuat juga pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama itu harus berpikir berulang kali. Disini tentunya kita berharap tentunya semua pihak itu harus juga melihat kepentingan dari korban kejahatan. Jadi bukan semata-mata melihat dari sisi pelaku kejahatan.

Kemudian juga perkara pemberantasan narkoba yang juga masih tetap kita galakan secara konsisten karena bagaimana pun kita melihat betapa luar biasanya akibat yang ditimbulkan karena kejahatan ini disamping pemberantasan terorisme. Hanya saja perlu kami sampaikan bahwa untuk perkara yang satu ini pemberantasan terorisme itu nampaknya masih diperlukan adanya perbaikan dan revisi Undang-Undang nya karena Undang-Undang yang kita miliki belum menjangkau dan menyentuh masalah bagaimana ketika ada kegiatan untuk merekrut anggota, pelatihan militer serta pengiriman Anggota ke luar negeri dimana dalam Undang-Undang kita yang ada harus menunggu dulu *action* aktivitas mereka, membunuh, merampok, mengebom dan lain-lain. Karenanya sekali lagi rasanya Undang-Undang terorisme itu mendesak untuk dilakukan perbaikan dan revisi penyempurnaan. Negara lain beberapa diantaranya tetap mempertahankan dan memiliki semacam internal *security eks* yang tentunya lebih membuka peluang bagi mereka untuk mengungkapkan indikasi bahkan adanya gejala akan terjadinya atau dilakukannya teroris, terror-terror dari pelaku terorisme ini sejak awal.

Berikutnya capaian kerja dibidang Pidsus. Saya ingin sampaikan bahwa kinerja Pidsus terkena dampak dari keputusan MK. Yang menurut saya justru menyulitkan upaya penegakan hukum itu sendiri. Kita awali dengan adanya keputusan MK tentang PK yang bisa diajukan lebih dari 1 kali. Kemudian juga keputusan MK yang menyatakan bahwa menetapkan tentang perluasan cakupan objek pra peradilan ketika saat menetapkan tersangka penggeledahan dan penyitaan. Dan ini sudah muncul pra peradilan yang menjadi trend setiap kali orang ditetapkan sebagai tersangka serta mereka mengajukan pra peradilan. Keputusan MK terakhir adalah adanya gugatan uji materi yang diajukan istri buron koruptor yaitu Joko Candra, yaitu Nyonya Ana Buntaran. Putusan tanggal 21 Mei 2016 Nomor: 23/PUU/XIV/2016, dimana dinyatakan disana bahwa Jaksa tidak bisa lagi melakukan peninjauan kembali. Kami beranggapan bahwa walaupun ada putusan MK ini tentunya tidak berlaku surut sehingga ketika istrinya Joko Candra mengajukan permintaan kepada kejaksaan agung supaya dihapuskan dari ... tentunya kami tidak bisa penuhi. Dan Jaksa juga tetap akan mengajukan PK ketika diperlukan nanti karena kami memiliki dasar hukum juga yaitu yurisprudensi. Yang mana ... Indonesia adalah juga merupakan sumber hukum. Nanti terpulang kepada Mahkamah Agung apakah akan menerima atau tidak. Berikutnya disini juga akan kami laporkan tentang surat kesepakatan bersama, KPK, Kapolri dan Jaksa Agung yang akan segera berakhir dan bahkan sudah berakhir. Nantinya akan diperbaharui lagi. Dan ada pemikiran bagi kami untuk mengusulkan adanya perluasan cakupan kerjasama dan kesepakatan bersama itu yaitu dimungkinkannya kalaborasi yang sinergitas penanganan perkara korupsi ketika aparat penegak hukum, penyidik, kejaksaan maupun kepolisian mengalami kesulitan dan

hambatan yang tidak bisa diatasi dan itu bisa dimanfaatkan kelebihan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Sehingga disini kami berharap nantinya akan ada kembali kerjasama koordinasi dan kolaborasi untuk bersama-sama menangani perkara korupsi oleh semua pihak secara bersamaan.

Berikutnya juga yang ingin disampaikan tentang adanya kecenderungan. Mohon maaf, sementara pengacara yang saat ini cenderung menganggap dirinya sebagai re-inkarnasi dari kliennya. Mereka tidak segan-segan kliennya supaya lari, supaya diam ketika diperiksa, mengajari untuk mangkir, mengajari untuk tidak menjawab bahkan mengajari untuk melakukan gugatan pra peradilan. Ini semua tentunya menjadi sebuah PR tambahan bagi aparat penegak hukum ketika harus menangani kasus-kasus yang harus diselesaikan. Kami laporkan bahwa sejak Januari sampai Mei 2016 Bidsus telah melakukan penyelidikan sebanyak 574 perkara, penyidikan sebanyak 521 perkara, penuntutan sebanyak 751 perkara dan eksekusi 505 orang, penyelamatan uang negara sebanyak 365 Miliar 995 Juta sekian serta pengembalian keuangan negara dari hasil operasi toll, Jorr S dan penjualan ... sebesar 1.206.687.076.000. Denda TPK (tindak pidana korupsi) sebanyak 13 Miliar lebih dan uang pengganti sebanyak 77 Miliar lebih. Ini membuktikan bahwa kejaksaan tidak main-main dalam upaya menagih piutang negara yang harus dibayar oleh para pelaku kejahatan.

Berikutnya bidang perdata dan tata usaha negara. Saat ini bidang perdata dan tata usaha negara mengalami kebanjiran menerima surat kuasa khusus dari banyak pihak termasuk dari Presiden, para Menteri, wakil Presiden juga dari BUMN serta pihak-pihak lain yang memerlukan perwakilan dalam menghadapi gugatan perdata. Datun juga menghadapi kebanjiran permintaan pembuatan MoU, kebanjiran permintaan *legal opinion* dan Datun juga melakukan upaya-upaya untuk pemulihan keuangan negara. ... negara saya pikir ada nanti. Sudah kami cantumkan dalam laporan kami berapa besarnya. Tapi cukup lumayan karena Datun berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 1 Triliun 42 Miliar, dan pemilihan keuangan negara sebanyak 740.806.000.000.

Kinerja bidang pengawasan kami laporkan bahwa pengawasan memposisikan dirinya sebagai *prime mover* penggerak utama, sebagai primus ... yang harus memposisikan dirinya sebagai suritauladan dan sebagai panutan. Dan kami selalu mengatakan bahwa pengawasan adalah laksana dokter yang dia harus pandai untuk mendiagnosa penyakit dan mencari obat yang tepat bagi oknum-oknum atau internal kejaksaan yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan-penyelewenangan. Beberapa saat yang lalu pengawasan juga menyelenggarakan video *conference* dihadapan para Kajati, para asisten, para Kajari dan para Kasi seluruh Indonesia untuk diberikan pengarahan dan dapat dialog langsung dengan Pimpinan dan unsur kejaksaan agung.

Dari Januari sampai Juni 2016 pengawasan menerima laporan pengaduan sebanyak 236 pengaduan yang terbukti 86 melalui proses inspeksi kasus dan telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa hukuman ringan sebanyak 23, sedang 34, dan hukuman disiplin berat 29.

Berikutnya, terakhir Badan Diklat. Diklat selalu meningkatkan intensitas kegiatannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Jaksa yaitu pernah melakukan pendidikan pembentukan Jaksa, pendidikan TP4 untuk memberikan pembekalan kepada petugas-petugas yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai tim pengawal dan ... bangunan serta pendidikan teknis lain. Katakanlah misalnya

penyelendupan perikanan dan sebagainya. Kemudian juga pendidikan ... dan kejaksaan telah melaksanakan pendidikan tentang revolusi mental. Dilakukan beberapa gelombang yaitu telah memberikan pendidikan dan pemahaman kepada seluruh Kajati, Kajari tipe Ayat, Pejabat Eselon II dan III di Kejaksaan Agung dan di Kejaksaan Daerah.

Demikian Pimpinan rapat yang kami hormati tentang perkara-perkara yang dianggap menarik perhatian mungkin nanti bisa ditanyakan kepada kami, nanti akan kami jelaskan beberapa kasus yang kami tangani sekarang masih berjalan meskipun menghadapi kendala, tantangan dan hambatan. Masing-masing mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri baik itu pidana khusus maupun pidana umum. Kita ambil contoh misalnya kasus pidana umum yang ditangani yang sangat menjadi perhatian masyarakat adalah kasus pembunuhan Mirna oleh tersangkanya yaitu Jesica Kumala Wongso. Juga upaya keras kita untuk bagaimana supaya putusan Mahkamah Agung tentang yayasan supersemar bisa segera dilaksanakan, diwujudkan. Mengenai eksekusi pidana mati, seperti kami laporkan tadi tidak menghadapi kendala berarti. Kalaupun ada atau ada kesan kita menunda pelaksanannya itu semata-mata seperti saya laporkan tadi adalah dengan pertimbangan untuk lebih memprioritaskan masalahnya yang lebih penting yaitu perbaikan ekonomi nasional. Tapi disamping itu juga kami sempat menghadapi hambatan untuk eksekusi ini dengan adanya tadi putusan MK yang bisa mengajukan PK lebih dari sekali. Sementara untuk 1 kali PK saja pun sudah menjadi hambatan kita. Kenapa demikian? Karena PK tidak ditentukan batasan waktunya untuk mengajukan. Kemudian juga adanya upaya hukum tidak lajim yaitu gugatan PTUN oleh para pengacara dari terpidana mati yang bersangkutan. Disamping juga kita melihat adanya kecenderungan mereka yang justru sudah menjalani hukuman di penjara, di lembaga pemasyarakatan untuk menanti pelaksanaan eksekusi mereka kembali melakukan tindak pidana kejahatan narkoba ini sebagai bandar maupun pengedar narkoba dari balik penjara.

DIPA tentang anggaran yang tersedia bagi eksekusi mati ini untuk tahun ini 16 orang. Kami sedang merencanakan untuk berapa orang nantinya akan segera kita ... ketiga ini. Sementara kami laporkan bahwa jumlah pidana mati keseluruhan berjumlah 152 orang. Tapi dari kasus pembunuhan 90 orang, terorisme 2 orang dan narkoba 58 orang. Dan saya pikir tentunya kedepan kami berharap perlunya dibuat peraturan pelaksanaan tentang PK ini untuk antara lain mengatur tentang pengertian no fum. Seperti apa no fum itu. Ini juga pembatasan waktu dan juga tata cara pengajuan PK. Karena sekarang ini sering kali PK diajukan tanpa kehadiran daripada terpidana.

Demikian Pimpinan rapat yang kami hormati. Selintas yang dapat kami laporkan dalam kesempatan ini. Dan untuk selebihnya mungkin bisa disimak dan dapat kejelasannya dalam laporan tertulis kami yang sudah kami sampaikan kepada Komisi III dan Dewan yang terhormat.

Sekian.

Terima kasih.

Kami kembalikan kepada Pimpinan rapat.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada Jaksa Agung atas penjelasan-penjelasan, jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III.

Selanjutnya kami persilakan Bapak/Ibu Anggota Komisi III untuk memperdalam tadi apa yang telah dijelaskan, telah disampaikan oleh Jaksa Agung. Kita bebas saja tapi jangan lupa waktunya. Santai. Kita sepakat sampai jam 16.00 kan? Kalau sepakat ya.

Silakan, kanan dulu ya Pak Junimart.

Kami persilakan.

F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman Anggota Komisi III, Pak Jaksa Agung dan jajarannya,

Tentu kami harus mengapresiasi capaian-capain dari kejaksaan agung. Pengembalian uang negara, terus hal-hal yang sudah dilakukan. Kalau saya membaca dari buku yang disampaikan kepada kami. Penanganan perkara dikejaksaan pak Jaksa Agung untuk Pidum saja sudah 240.720. Untuk Pidsus itu 2351 perkara Pak termasuk untuk SPDP ini Pak. Total 243.071 belum termasuk Datun ini Pak. Datun itu 991. 243.071 perkara yang ditangani oleh kejaksaan, kurun waktu Januari sampai Mei 2016. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Kejaksaan bisa bekerja dengan beban kasus yang cukup tinggi ini dengan anggaran atau dengan penganggaran yang tidak sesuai menurut saya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kejaksaan dalam ini kejaksaan agung itu bisa melaksanakan Pak pekerjaan yang sebanyak ini dengan anggaran yang menurut hitungan saya Pak sangat-sangat kurang.

Pak Jaksa Agung,

Itu jaksa-jaksa didaerah pak semua mengeluh bahkan ada yang menangis Pak. mereka kan tidak boleh menolak perkara. Mereka tidak boleh mengatakan perkara ini tidak boleh maju Pak. Kalau mereka menahan perkara maka si pelapor akan marah Pak, bahkan mungkin dilaporkan ke Komnasham. Bisa semakin ramai ya.

Terakhir saya ke Dapil Pak. Anggaran untuk perkara korupsi hanya satu Pak setahun. Sementara di daerah-daerah itu Pak paling sedikit 11 perkara setahun pasti ada Pak disana. Tadi malam saya baru komunikasi dengan salah satu Kajari Pak. Beliau titip pesan, tolong keluhan kami ini sampai kepada Jaksa Agung, bahwa kami didaerah selalu dikejar oleh masyarakat yang merasa dirugikan tetapi karena keterbatasan anggaran kami tidak bisa bekerja secara maksimal. Karena Pak Jaksa Agung, kekurangan dana ini akan menimbulkan masalah akuntabilitas keuangan dan integritas personil. Inilah jadi dasar nanti. Integritas personil akan menjadi terganggu karena kekurangan anggaran ini Pak. Kita harus betul hati-hati Pak. Jadi saya tidak heran kalau misalnya ada oknum kejaksaan seperti yang kita dengar baru-baru ini kejadian Pak. Walaupun sebenarnya itu bukan menjadi syarat. Tetapi alangkah malunya kita sebagai lembaga penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar '45 dengan anggaran yang betul-betul dibatasi dan memang kurang Pak. Saya sempat kaget bagaimana Pak Jaksa Agung menerangkan ini sedemikian rupa dengan perkara yang ratusan ribu itu Pak masih bisa

bekerja. Tolong nanti Pak Jaksa Agung berkenaan klu memang ada waktu bisa menjawab ini Pak, ya dengan anggaran seperti tadi pagu anggaran untuk indikatif kejaksaan RI 2017= 4,6 itu setahun Pak ya? Ini baru Januari sampai Mei Kejaksaan Agung sudah harus melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan 243.071 perkara Pak. Untuk Pidsus 2351, sementara didaerah-daerah itu Pak Cuma satu perkara korupsi yang bisa mereka tangani 1 tahun Pak. Disini tercatat 2351 itu dalam periode Januari sampai Mei 2016. Tolong nanti Pak Jaksa Agung. Ini kita saling koreksi, kalau saya salah saya tarik. Apa yang saya sampaikan tetapi saya pikir saya tidak salah Pak karena di buku ini yang saya baca Pak. Bagaimana beban perkara sedemikian rupa sangat tinggi dan sangat besar dengan perkara yang sedemikian minim sekali Pak.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan.

Silakan Pak Kyai.

F-PKS (H. TB. SOENMANDJA):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Selamat siang, dan

Salam sejahtera buat kita semua,

Pak Ketua dan Anggota Komisi yang terhormat,

Bapak Jaksa Agung yang saya banggakan beserta jajaran, selamat menunaikan ibadah Ramadhan.

Ada 2 hal yang menarik untuk saya disamping yang disampaikan secara umum tadi itu. Yang pertama, ketika pada session pertama tadi. Pak Jaksa Agung menyampaikan informasi singkat tentang adanya sekian banyak jaksa terpilih yang terbaik di seluruh Indonesia yang didirikan 1 Satgas. Nah ... saya adalah kalimat-kalimat yang mengatakan begini, "yang tidak menjadi beban biaya negara". Nah kalimat itu Pak Jaksa Agung. Kalimat ini kira-kira penjelasannya seperti apa? Pertama, dana apa yang dipergunakan atau pembiayaan mana yang dipakai untuk ... tersebut karena bukan biaya. Ini sangat penting agar tidak ada purbasangka atas pembiayaan ini. Jadi kami ingin klarifikasi Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ... untuk kebaikan jajaran Jaksa Agung itu.

Yang kedua, ini pada halaman 5. Bagi saya sangat menarik dan sederhana disini walaupun ada uraian sedikit. Pada butir huruf dan disana Pak Jaksa Agung (hal.5), "dalam rangka aliran kepercayaan maka telah terhimpun data bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 838 aliran kepercayaan dan 215 aliran keagamaan. Jika

memungkinkan secara pribadi saya ingin mendapat ... Pak Jaksa Agung, data tersebut. Baik nama, toko, gerakan. Sebab ini bisa jadi bahan riset yang sekaligus juga ikhtiar kita berpartisipasi untuk menjaga ketertiban negara. Sebab partai politik juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami dari PKS khususnya juga banyak bersentuhan dengan acara keagamaan tersebut. Jadi mohon dengan hormat, kiranya dapat kami terima. Tidak terlalu lama sehingga bisa ... dengan baik.

Kami mengapresiasi Pak Jaksa Agung beserta jajaran. Seluruh prestasi yang dicapai atas laporan tadi dan 2 hal itu kami sampaikan.

Terima kaish.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya silakan dari PKB.

F-PKB (H. JAZILUL FAWAID, SQ.,MA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran,**

Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa Pak. Nama saya Jazilul Fawaid.

Pak Jaksa Agung,

Tentu kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan yang sedang dan yang akan. Cuma kami melihat beberapa dari sisi pagu indikatif 2017 sekaligus potret kita di 2016. Ada 3 jenis belanja yang disusun oleh Pak Jaksa Agung dari anggarna 4,6 Triliun. Dan ketika itu masuk pada rincian pagu indikatif itu hampir 60% itu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kejaksanaan RI sebanyak 3,442,53 sekian Triliun.

Pak Jaksa Agung,

Apa yang kemudian kok bisa cara menyusun anggarannya sedemikian besarnya di dukungan teknis.

Point yang kedua Pak, saya mengapresiasi apa yang menjadi program Bapak dimana meletakkan pengawasan sebagai *prime over*. Tapi ketika saya lihat di pembagian anggaran itu hanya Rp22.945.693.000,- Pak. Jadi sebenarnya disebut *prime over* dengan jumlah anggaran yang kecil itu, itu benar apa bagaimana. Maksud saya itu. Padahal disebut sendiri oleh Bapak bahwa di pengawasan memiliki fungsi yang luar biasa karena akan merubah *mainset*, kultur set, *behaviorset*, serta paradigma dari yang bersifat rutinitas menjadi agen perubahan tetapi anggarannya Cuma 22 Miliar.

Pak Jaksa Agung,

Mungkin perlu Pak direvisi, atau diperbaiki diantar Eselon I supaya ada pembagian yang normal. Jadi tidak numpuk pada tugas, program dukungan manajemen saja.

Yang kedua, Pak Jaksa Agung. Kami juga memberikan apresiasi karena Bapak berhasil mengembalikan uang negara melalui rampasan penyelamatan uang negara 1 Triliun dan pemulihan keuangan 740 Miliar. Itu posisinya di Jaksa Muda penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Setelah saya lihat anggarannya Cuma 17.646.345.000, kecil sekali Pak. Padahal saya baca di paparan Bapak bahwa ini mungkin Pak, kenapa sering kali negara sering kalah itu Pak ketika proses di pengadilan. Padahal disini disebutkan bahwa tugas dari bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan Pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Nah maksud saya Pak, kenapa kok disini anggarannya Cuma 17 Miliar Pak. Padahal banyak kasus-kasus pengadilan tata usaha negara dimana Bapak mewakili negara, apakah tidak bisa dicarikan lagi, apakah dengan cara merubah susunan yang ada atau kita minta melalui dukungan Komisi III kepada Kementerian Keuangan Pak agar lebih banyak lagi kekayaan negara yang bisa diipulihkan dan dikembalikan. Karena Pak Jaksa Agung ini mampu menyakinkan Presiden Pak dan seluruh jajarannya. Karena sekarang memang eranya dimana penegakan hukum ini menjadi sangat penting Pak Kejaksaan Agung.

Nah banyak hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan tapi cukuplah karena beberapa point-point yang sudah Bapak jelaskan tetapi tentu sebagai catatan akhir Pak. Tolonglah Pak untuk yang pidana, narkoba ini segera di eksekusi Pak. Karena itu sangat mendengar kemarin Pak dari salah satu pejabat yang berwenang bahwa putaran dari uang narkoba itu perbulannya 3,4 Triliun Pak. Putaran uang di narkoba. Nah kalau itu berapa kerusakan terhadap negara Pak, kerusakan terhadap generasi Pak. Nah oleh sebab itu salah satu terapinya mempercepat. Pak Jaksa Agung tidak usah ragu-ragu Pak dan tidak usah melihat musim hujan atau musim panas Pak. Kalau sudah saatnya di eksekusi saja Pak. Karena ini saya khawatir Pak, saya tuh punya tetangga Pak. Anak SMA dia tinggal dirumah yang tiba-tiba saja. Orang tuanya sudah mengeluhkan bahwa anaknya kena narkoba dan dia tidak tahu. Dia tidur tiap malam di rumah itu. Nah itu menurut saya, mungkin kalau terjadi pada keluarga kita Pak itu baru akan merasakan bahwa narkoba ini memang luar biasa menjadi ancaman buat kita.

Jadi terima kasih Pak Jaksa Agung, dan seluruh jajarannya. Dan mudah-mudahan kedepan akan lebih baik dan tentu kami di Komisi III akan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan.

Demikian.

***Wauallahumafiq'illaaqimintoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih banyak.
Selanjutnya Fraksi Partai Golongan Karya.

F-PG (AHMAD ZAKY SIRADJ):

Sedikit Pak Ketua.

Pak Jaksa Agung dan jajarannya,

Dalam penjelasan yang baru saja disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Saya agak sedikit ingin penjelasan lebih lanjut tentang penyadapan. Karena beda antara Pak Jaksa Agung atau jajaran Jaksa dengan KPK dalam protap penyadapan terhadap indikasi korupsi. Kenapa itu berbeda? Dan saya kira sebagaimana tadi Pimpinan atau ketua menjelaskan tentang keinginan untuk kembali membangun kejaksaan sebagai penegak hukum yang seharusnya mengembalikan karisma hukum selain KPK. Karena latar belakang KPK itu berdiri adanya kelemahan dari jajaran kejaksaan. Tetapi setelah saya mengamati dan mengikuti penjelasan ternyata mungkin didalam proses penyadapan ini saya kira kemudian kejaksaan tidak menjadi sesuatu yang utama. Padahal dalam struktur penegakan hukum yang sesungguhnya adalah kejaksaan yang seharusnya terdepan dalam hal ini. Oleh karena itu, apakah tidak kemudian sama atau lebih hebat dari KPK terhadap penyadapan ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya kami persilakan

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH., MH):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat teman-teman Komisi III,
Bapak Jaksa Agung beserta jajarannya,**

Pertama-tama saya mendapatkan penyampaian tadi mengenai masalah kinerja daripada kejaksaan. Yang menjadi pertanyaan saya pada saat ini adalah awalnya Pak Jaksa Agung pernah membuat Satgas anti korupsi. Saya juga melihat laporan daripada kinerja Satgas anti korupsi secara spesifik. Memang ada beberapa kasus-kasus korupsi tetapi apakah ini merupakan kinerja daripada Satgas itu atau secara kasus itu ditangani oleh bukan Satgas karena dalam anggarannya pun juga tidak ada mengenai anggaran untuk Satgas anti korupsi itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kita mungkin dalam kurun ini sering melihat ada kasus yang cukup menonjol sebenarnya yaitu kasus pra peradilan ... Kenapa sampai kejaksaan kalah sampai 3 kali dan sekarang kondisinya Lanyalah sendiri sudah ada, sudah kembali ke tanah air dan sudah dilakukan pemeriksaan. Namun kalau pra peradilannya kalah 3 kali, langkah-langkah apa kejaksaan untuk menangani masalah Lanyala ini sehingga nasibnya tidak seperti kasus pra peradilan tersebut. Jadi kalau kita melihat disini sepertinya ada tarik menarik antara kejaksaan dan Mahkamah Agung. Tolong mungkin Pak Jaksa Agung bisa menjelaskan sebenarnya kasusnya seperti apa, karena masyarakat sering melihat bahwa ini sebenarnya adalah kasus pengulangan. Nah

kejaksaan mengatakan tidak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya ... (suara tidak jelas).

Kemudian yang ketiga, yang terakhir Pak Jaksa Agung. Ini suara dari Dapil kami. Dapil Bojonegoro dan Tuban. Dimana ada kasus Bimtek Tahun Anggaran 2012. Mungkin Pak Jaksa Agung juga sudah mendapatkan surat tersebut dan kami juga mendapatkan surat tersebut sebagai tembusan. Dimana disitu sudah diputus ada satu tersangkanya Saudara Abdul Wahid. Tetapi yang lain-lainnya padahal dalam pengadilan juga terbukti bahwa semua Anggota DPRD pada saat periode Tahun 2009-2014 itu mereka menerima Bimtek tersebut. Nah mohon mungkin Pak Jaksa Agung, karena ini adalah merupakan kepastian hukum di Dapil kami. Jangan sampai ini juga membuat gelisah di Dapil kami juga mengenai kasus Bimtek tersebut. Nah mungkin bisa tertangani dengan baik.

Saya kira itu saja Pimpinan dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.
Selanjutnya kami persilakan.
Silakan Pak Nasir.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si):

Terima kasih Ketua.

Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pak Jaksa Agung beserta para Jaksa Agung Muda yang baru hadir pada acara Rapat Kerja pada hari ini dan juga jajaran yang baru hadirin,

Yang pertama, tentu sama seperti sejumlah rekan-rekan kita memberikan dukungan moral dan apresiasi kepada kejaksaan agung dalam hal ini Jaksa Agung yang telah melakukan beberapa kegiatan dan juga terobosan yang diharapkan bisa mendekatkan institusi kejaksaan agung terkait dengan upaya untuk memberikan keadilan.

Pak Jaksa Agung,

Saya pikir dalam konteks jaksa masuk sekolah. Saya pikir ini sesuatu kegiatan yang positif tapi kalau masuk kampus tentu namanya bukan sekolah lagi Pak. Mungkin Jaksa masuk kampus namanya. Jadi mungkin namanya bisa kita ubah, tidak jaksa masuk sekolah. Barangkali ini ringan Pak Jaksa. Tidak begitu berat usulan ini. Jadi tinggal diubah saja Jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk kampus. Sama seperti kita sosialisasi 4 pilar juga masuk kampus Pak.

Kemudian yang kedua soal Adiyaksa monitoring center ini. Ini apakah juga terkait dengan kegiatan selama ini memburu asset koruptur yang ada di luar negeri yang tentu

bekerjasama dengan institusi hukum lainnya. Nah apakah ini memang sama, atau ini memang ini terpisah. Itu yang kedua.

Yang ketiga, soal harta sitaan atau rampasan yang pernah saya baca di media dan juga pernah lihat di televisi soal terbengkalainya harta-harta rampasan atau sitaan ini. Sehingga kemudian itu juga berdampak terhadap nilai. Nilai atau barang harta tersebut. Nah ini seperti apa kejaksaan mensiasati karena barangkali masih minimnya tempat sehingga kemudian tidak bisa diletakkan pada satu tempat. Jangankan kejaksaan, KPK juga banyak barang atau harta sitaan mereka, rampasan mereka yang terbengkalai. Akhirnya lapuk kena hujan, lekang dengan panas. Nah ini bagaimana soal asset atau harta-harta rampasan sitaan tersebut Pak Jaksa Agung.

Kemudian juga soal putusan ... Ya kalau tadi sempat dikatakan oleh Pak Wihadi di Surabaya, yang mana Jaksa "dikalahkan" oleh pengadilan meskipun istilahnya ini menurut saya tidak tepat. Tapi Pak Jaksa Agung kadang-kadang kalau kita lihat 3 kali seperti itu teringat dengan lagu Pak ya, jangan sampai 3 kali Pak. Ada lagunya jangan sampai 3 kali.

Jadi soal ini memang ada beberapa putusan ... yang sebenarnya kita sadar itu tidak menghentikan upaya penegak hukum, penyidik untuk menemukan kebenaran atau tindak pidana tersebut. Jadi misalnya kalau tidak salah saya, Pak Dahlan Iskan misalnya nasibnya seperti apa sekarang. Karena kita sadar bahwa perapit itu tidak kemudian menghilangkan, kemudian menyurutkan langkah penyidik untuk kemudian menemukan bahwa ada tindak pidana tersebut. Jadi kalau kemudian diibandingkan mungkin akhirnya public menilai ini ada sesuatu dengan kasus itu. Ada motif dibalik, diluar penegakan hukum sehingga kenapa putusan Perapit itu seolah-olah menyurutkan langkah para Jaksa untuk menemukan kebenaran dalam tindak pidana tersebut bahwa ada tindak pidana tersebut.

Nah terakhir kemarin kami Pak Jaksa Agung didatangi oleh korban Novel dan juga masyarakat Bengkulu. Karena waktu itu kita sedang rapat maka ada beberapa anggota yang menerima dan saya termasuk anggota yang menerima mereka didampingi oleh salah seorang staf sekretaris. Nah mereka mempertanyakan putusan Perapit itu sudah memutuskan bahwa tidak boleh dihentikan penuntutannya. Nah sekarang itu bagaimana nasibnya. Nah karena memang di Bengkulu juga menurut penuturan mereka itu seperti sudah ada keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dikhawatirkan kondisi ini akan menimbulkan persoalan baru disana. Nah jadi kasus-kasus yang sudah ada putusan Perapit dimana kasus itu seolah-olah diibandingkan dan kemudian juga terakhir kasus yang menimpa Novel Baswedan itu, nah itu seperti apa Pak Jaksa Agung.

Nah kemudian juga soal dana hibah Pak didaerah-daerah. Disini kami sebutkan ada kasus misalnya di Sumatera Utara yang menyebabkan Gatot Pudjonugroho menjadi tersangka dan masih dalam tahap penyelidikan. Nah saya pikir sebenarnya Pak JA, kalau kita mau jujur. Didaerah-daerah, di provinsi itu banyak dana hibah yang bermasalah. Di Dapil saya, di Aceh itu juga luar biasa masalahnya dana hibah itu. Ya sayang Pak Tarmidji tidak lama disana. Mungkin kalau lama lagi Beliau selesailah itu dana-dana hibah di Aceh itu. Tapi karena Beliau tidak lama disana akhirnya memang belum tuntas, belum selesai dana hibah ini Pak. Banyak sekali temuan-temuan dana hibah ini yang tidak jelas, yang tidak ngelantur dan sebagainya. Artinya diberikan tanpa lewat sebuah evaluasi seperti yang dipaparkan dalam keterangan Pak JA disini. Tidak ada evaluasi, apakah memang mereka layak untuk menerima dana hibah atau tidak, tidak ada evaluasi sama sekali.

Dan terbengkalai semua pekerjaan-pekerjaan dilapangan. Dimana kemudian kita melihat ini. Nah karena itu Pak JA yang saya hormati soal dana hibah ini, agar tidak terkesan diskrimatif barangkali ya daerah-daerah terutama daerah pemilihan saya di Aceh sana perlu kemudian diingatkan agar kemudian dana-dana hibah itu ya diproses kalau memang bermasalah. Jadi jangan Gatot saja yang kena, kira-kira begitu. Bukan berarti saya katakan bahwa daerah lain harus seperti itu atau punya bermasalah. Jadi ini persoalan dengan dana hibah Pak JA yang saya hormati.

Dan yang terakhir sekali soal Satgas korupsi yang tadi disebutkan oleh teman-teman dan juga tim pengawal pembangunan di daerah Pak. Jadi memang ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para Jaksa dilapangan. Ketika kita reses, baik reses komisi maupun reses individu anggota itu bertemu dengan Jaksa. Mereka memang ketika kita diskusi soal ini ya bagaimana Pak soal dilapangan itu, soal bagaimana petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya dilapangan, apakah cukup misalnya ... intel datang ketempat itu, lihat-lihat sudah itu pulang. Melihat pembangunan infrastruktur, kemudian bicara disana, bicara disini kemudian pulang misalnya. Nah ini seperti apa sehingga benar-benar seperti yang tadi Bapak sampaikan memberikan dukungan terhadap program prioritas yang dilakukan Pemerintah tentang pembangunan infrastruktur sebagai pondasi pembangunan itu sendiri. Jadi TP4 itu Pak dan kemudian Satgas korupsi di daerah itu barangkali perlu ditajamkan karena hasil informasi yang kami terima di daerah-daerah memang ini belum seperti yang kita harapkan.

Dan yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan soal pidana mati ini Pak. karena tadi memang ada alasannya karena hujan, musim hujan. Jadi memang Pak, barangkali seperti yang dikatakan oleh teman saya Pak Jazilul Fawaid ya karena memang ini sangat mencemaskan, sangat meresahkan mungkin alasan bahwa musim hujan menurut saya belum bisa diterima Pak kalau alasan misalnya musim hujan. Karena kita bisa gunakan ditempat gedung, ya bisa kita tembak, bisa eksekusi misalnya. Itu dalam pandangan kami. Barangkali dalam pandangan Jaksa beda lagi. Harus terbuka dan lain sebagainya. Sebab dalam pandangan kami yang penting kan eksekusinya Pak, mau dimana. Kalau dulu kan masa Orde Baru dikasih tahu sama public. Ditembak saja Der, kan begitu Pak. Sekarang karena era reformasi, media juga sudah meliput seolah-olah kayak jadi drama, jadi sinetron eksekusi mati itu. Ada barakuda semuanya menjaga, semuanya, memang luar biasa.

Jadi barangkali beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir kepada teman-teman Komisi, atau Anggota Banggar yang ada di Komisi. Ya tentu kalau dari tahun ke tahun, kita lihat anggaran kejaksaan ini belum sesuai seperti yang diharapkan. Terus terang sebenarnya kita miris melihat anggaran kejaksaan. "keluhan" teman-teman di daerah soal Pidum karena mereka menerima limpahan dari kepolisian. Itu kadang-kadang target mereka misalnya 10 itu bisa 100, 150 dan sebagainya. Nah tetapi mereka dilapangan tetap bekerja, tetap bekerja. Menerima limpahan itu kemudian meneruskannya ke pengadilan dengan situasi yang sangat ... tersebut. Nah karena itu saya pikir memang saya karena sudah 3 periode di Komisi III melihat anggaran Komisi kejaksaan ini memang sangat-sangat seperti yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan dalam 2017 meskipun ini pagu indikatif kita bisa berharap lebih dari yang sudah ada didalam pagu indikatif ini.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (I PUTU SUDIARTANA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Semoga kedamaian dari segala arah,

**Yang terhormat Pimpinan yang saya banggakan,
Bapak Jaksa Agung beserta jajarannya, dan
Keluarga besar Komisi III,**

Saya Putu Pak, Dapil Bali. Saya tidak tahu daerah lain, kecuali ada permasalahan nasional. Saya membawa dan pesan ini kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidsus khususnya terkait dengan hukum adat di Bali. Apa yang Saudara kami, Pak Nasir Jamil tadi sampaikan memang betul. Karena hibah itu dibungkus dengan NPHD Permendagri Nomor 19 Tahun 2013. Berat sekali Pak, kami dari Dapil Bali memiliki hukum adat yang sudah dipahami. Karena bantuan dari Kementerian/Lembaga tugas perbantuan, dekonsentrasi APBD I dan II itu melimpah sekali di Provinsi Bali. Yang menjadi sedih dan teringis adalah pemangku adat itu masuk penjara Pak. Mungkin kalau di Jawa, Ustad. Ustad yang tidak tahu apa-apa, pemangku, pendeta. Yang tidak tahu apa-apa gara-gara ... memuput niatnya di Bali itu susah sekali. Satu contohnya Pak, di Bali itu ada hari yang memang tidak bisa dirunding disaat menerima hibah itu, menandatangani NPHD umpamanya bulan Desember. Harinya tidak cocok, dia tidak akan bisa melaksanakan kegiatan itu Pak, menunggu hari yang baik. Coba berat sekali adat ini. Jadi dia harus melaksanakan bisa lewat tahun baru ... namanya. Nah setiap peparuman itu ditunggu, apalagi ada orang yang meninggal Pak sampai 4 bulan-5 bulan mayatnya dirumah. Ini berat sekali untuk menerima. Hukum positif kita ini sudah jelas melanggar KUHP 184 itu, jelas sekali. Nah ini kejadian di negara, kejadian di ..., mana-mana hampir di Bali tetapi hanya beberapa yang bisa dilanjutkan karena itu kan korupsi hanya 1000, 2000 hampir 50.000 Rupiah karena lawan politik di Bali itu ada 2 ormas yang memang tegang sekarang. Setiap sidang itu pasti hampir berdarah yaitu lascar Bali sama Baladika. Kepala desanya Baladika mungkin masyarakatnyalah Laksar Bali. Kepala Dusunnya Baladika, masyarakatnya lascar Bali. Selalu konflik ini. Ini kejadian di Bali. Kemarin sidang hampir berdarah. Untung penegak hukum peka disana Pak. Kami sebagai masyarakat Bali sudah minoritas bermasalah lagi, tidak bisa menunjukkan keakraban.

Yang kedua adalah memang kemarin itu Undang-Undang Nomor 23, bantuan hibah itu mesti harus berbadan hukum. Sekarang berubah lagi. Boleh atas nama kelompok, Banjar, dusun, desa, boleh. Semakin ribet lagi dan dana desa ini lagi. Betapa ribetnya ini di Bali dengan hukum adat. Saya minta kepada Bapak Jaksa Agung, mungkin

di sosialisasikan ke kampung-kampung melalui pendamping sekarang itu B4, kira-kira seperti itu. Supaya masyarakat kami khususnya pemangku-pemangku adat. Niatnya mengabdikan kepada umatnya akhirnya masuk di jeruji besi.

Yang ketiga adalah terkait dengan kasus Pak Winase mantan Bupati Jembrana. Dia sudah terdapat 2 kali. Sekarang di proses lagi dan ditahan. Dari kaca mata saya itu yang bertanggungjawab adalah KPA-nya (Kuasa Pengguna Anggaran). Namun dalam kebijakan disana Satker PPK-nya itu sudah jelas-jelas sekali menandatangani juga atau kesepakatan untuk menevika beasiswa. Itu lepas sekali. Sekarang mereka menerima hukuman. Yang ketiga ini, sudah masuk penjara, sekarang lagi dan sekarang lagi. Ini diatas keadilan, apakah tidak ada kemanfaatan, tidak ada hak asasi disana. Sudah jelas-jelas sekali Bapak Jaksa Agung, apakah ada hati nurani seseorang yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa bergerak lagi diceraikan gara-gara hal seperti itu mungkin ini ada hati yang berbicara di seorang Bapak Winase.

Hanya itu saja.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Taufiq.

F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pendek saja. Pertama kita ketahui Pimpinan yang saya hormati dan Pak Jaksa Agung dan jajarannya. Kita ketahui bahwa kejaksaan agung menolak permohonan terpidana penyelewengan di BLBI, Samadikun Hartono untuk mencicil kerugian sebesar 169 Miliar tersebut. Sebetulnya ini permasalahan hukum biasa yang kalau itu adalah memang diterima cicilannya tidak ada masalahnya kemudian juga kalau ditolak sebenarnya tidak ada masalahnya. Cuma harus dilihat itikadnya. Kalau memang itikadnya tidak ada, tidak baik menurut saya itu boleh barangkali kejaksaan itu bertindak lebih jauh. Kalau melihat tidak ada unsur itikad baik dalam kasus ini maka upaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya penyitaan asset. Saya rasa itu bisa dilakukan.

Yang kedua, berkenaan dengan masalah keputusan Perpu yang mendorong ada hukum kebiri. Dan kemudian ada sejumlah isu kita lihat bahwa ada penolakan dari pihak kedokteran. Hal ini disuarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang menolak untuk melakukan hal tersebut. Kita melihat kalau ini memang harus kita sikapi bahwa ada sikap dari kedokteran itu adalah benar maka ini adalah menurut saya akan menimbulkan berbagai dampak terhadap upaya kita atau dorongan masyarakat dalam konteks ini. Nah saya ingin tanyakan didalam hal ini bagaimana sikap kejaksaan agung melihat sikap seperti yang disampaikan oleh IDI tersebut.

Mungkin demikian dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Masih ada?

Kalau tidak ada dari Anggota Bapak/Ibu sekalian kami.

F-PDIP (Drs. EDDY KUSUMA WIJAYA, SH., MH., MM):

Ijin Ketua.

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Jaksa Agung dan staf yang saya hormati,

Banyak hal yang sebetulnya ingin kita bicarakan walaupun waktunya agak mepet. Ini sebentar lagi ada acara lagi. Yang menjadi pertanyaan kami, kerjasama antara kepolisian Jaksa Agung dan KPK. Didalam penegakan hukum ini sampai sekarang belum terlihat bahwa adanya suatu kerjasama dalam penegakan hukum terutama di bidang korupsi dan disamping itu para penegak hukum yang saya sebutkan tadi terkesan tidak paham dengan program Pemerintah didalam penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum terkesan ya begini-begini-begini saja. Katakanlah tidak ada gebrakan walaupun sekarang Pak Jokowi sudah memesankan atau memerintahkan, kerja-kerja-kerja. Kita kerja keras. Ini saya ambil contoh kasus di Banten. Kasus di Banten ini dulu kasus besar yang sudah melibatkan Bapak Akil Mochtar, Ibu Ratu Atut dan Pak Wawan. Pak Wawan itu mobilnya sudah disita 78 biji termasuk ferari mungkin sekitar 10 ferari. Tapi kasusnya tidak selesai-selesai. Sudah berapa tahun sampai sekarang ini. Dan kasus ini kalau saya lihat sebagian sudah ditangani oleh kejaksaan agung tapi malah saya lihat Jaksa Agung agak melemah-lemah didalam pengusutan kasus ini. Kenapa saya katakana melemah, ada tahanan orang yang sudah ditahan setahun diputusin setahun. Dituntut 1,5 tahun, diputus kasus korupsi.

Kemudian intelijen kita, intelijen kejaksaan atau intelijen penyidikan itu juga tidak paham. Itu kasus-kasus yang ada di Tangsel itu. Itu masih dikendalikan sama Pak Wawan. Masa penyidikanya tidak tahu. Pak Wawan mengendalikan kasus-kasus tender yang ada di Tangsel itu dari dalam penjara. Jadi ini kalau saya lihat, kita tidak tahu itu. Padahal masa tidak tahu kasus itu dikendalikan Pak Wawan dari dalam penjara. Baru kemarin teman-teman itu pulang menghadap Pak Wawan. Kemudian yang menjadi koreksi juga buat kita kenapa Bu Airin tidak kena. Sedangkan yang menjadi objek korupsi itu adalah anggaran yang ada di Pemerintah Daerah yang ini Pak Wawan. Hasil daripada itu sudah disita sama sebagian besar oleh KPK tapi sebagian kecil oleh kejaksaan agung. Nah kasus-kasus yang sudah ditangani ini sampai sekarang tersendat-sendat. Baik yang di Provinsi Banten yang melibatkan Bu Atut maupun di Tangsel termasuk kasus-kasus Alkes itu terkesan tidak ditangani. Kalau kita mau kaji-kaji terkesan kejaksaan tidak mengerti pasal-pasal yang bisa mengenakan orang ini terlibat. Kalau tidak salah ada Pasal 56, 55 tapi terkesan dibiarkan.

Kemudian kami juga pernah mengoreksi kasus ini ke KPK. Itu mobil sudah disita ... itu kok dibiarkan saja. Dan saya bilang kenapa kasus Wawan dan Bu Atut tidak ditangani kasus korupsinya. Oh sudah Pak, sudah kami tangani. Itu yang sudah ditangani dan sudah diproses itu adalah kasus penyyuapan terhadap Akil Mukhtar tapi kasus korupsinya yang selama ini yang banyak sudah diungkap-ungkap itu sampai sekarang tidak ditangani. Kemudian juga ada titipan, pesan dari Sumsel. Kasus yang berkaitan dengan Gubernur Sumsel. Kalau gak salah hari ini sudah ditangkap nih satu, asisten satu kalau gak salah oleh Kejaksaan Agung. Nah ini korupsi disana itu banyak benar yang sudah diperiksa. Kami tahunya sudah periksa-periksa-periksa dan sampai sekarang sudah 1 hari ini ditangan. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah ini kasus-kasus seperti ini kami mohon pada kejaksaan, kami mohon ini agar dituntaskan. Jangan sampai pelakunya itu hanya ... saja yang diusut tapi yang lain ini turut serta menerima, memerintahkan, itu pun tidak di usut. Sehingga masyarakat di luar tidak puas sama kita tentunya terhadap aparaturnya penegak hukum.

Mungkin itu saja Pak Pimpinan yang kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih banyak.

Pak Edi Kusuma Wijaya. Ini Beliau fasih sekali soal teknis-teknis hukum itu. Bahas apa itu? Belanda? Berarti Beliau ini pasti punya pengalaman lama di bidang penegakan hukum. Jadi bisa juga Beliau ini mantan hakim. Kalau gak mantan hakim mantan Jaksa. Kalau bukan mantan Jaksa ya mantan polisi mungkin karena Bahasa-bahasa yang dipakai fasih sekali.

Terima kasih masukan dan pertanyaannya.

Kami persilakan dari meja Pimpinan.

F-PG (TRIMEDYA PANJAITAN, SH., MH):

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Ini Pimpinan yang sangat demokratis, makanya rapat bisa sampai jam 09.00 malam, semua orang ditawarkan untuk bertanya.

Saudara Jaksa Agung beserta jajarannya,

Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, sepanjang ingatan kami posisi wakil jaksa agung itu sudah kosong mungkin 4-5 bulan. Mungkin bulan Januari Pak Andi Nirwanto sudah pensiun. Kami ingin tahu Saudara Jaksa Agung, apakah prosesnya sudah jalan dan sudah sampai mana karena kalau kita lihat didalam Undang-Undang kejaksaan khususnya di Pasal 18-nya kan sudah dijelaskan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung. Organisasi yang begini besar kalau tidak ada wakilnya saya pikir akan agak lamban juga jalannya. Sama juga Polri tentu harus ada Wakapolrinya. Jadi tolong penjelasan itu Saudara Jaksa Agung sampai mana tahapannya. Mudah-mudahan sudah berproses. Yang agak kita prihatinkan kalau belum berproses.

Nah yang kedua, sampai saat ini sepanjang pengamatan kami di beberapa daerah terutama di kampung kami Sumatera Utara Saudara Jaksa Agung. Masih banyak paling tidak 3 sampai 5 Kejaksaan negeri yang sudah lebih dari 2 tahun Kajarinya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seorang Kajari lebih dari 2 tahun. Padahal idealnya sepanjang pengetahuan kami di kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan itu biasanya 1 tahun sampai 1,5 tahun sudah bergeser itu karena itu juga menyangkut karir orang. Jadi dalam penjelasan Saudara Jaksa Agung dibidang pembinaan kita tidak lihat itu bagaimana proses mutase, promosi dan demosi yang ada di institusi Kejaksaan. Paling tidak sepanjang Pak Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Jangan sampai terjadi seperti jaman Pak Abdurahman Saleh. Itu pada saat itu bahkan ada Jaksa tinggi yang merangkap. Saya masih ingat benar Pak Litonga mungkin pada saat itu Saudara Jaksa Agung juga masih aktif. Dia merangkap jaksa tinggi di 2 Provinsi, Kalimantan Tengah sama mana itu, Pak Litonga itu. Jadi tolong diperhatikan Pak, kita menginginkan Kejaksaan ini harus maju. Apalagi kita harus juga jawab tantangan masyarakat Saudara Jaksa Agung bahwa Jaksa Agung ini bisa juga dipimpin seorang yang berlatarbelakang partai politik dan dia juga tidak akan melakukan politisasi terhadap kasus-kasus di daerah.

Yang ketiga yang kami sampaikan, soal keluhan Kajari ... Kajati. Mungkin juga keluhan kami juga, banyak orang juga. Kenapa sih Kejaksaan ini Saudara Jaksa Agung tidak seperti di kepolisian. Untuk urusan Kepala Seksi saja harus ke Jakarta, harus urusan Jambin. Begitu beratnya tugas Jambin kita ini. Nah apakah mungkin, saya ingat betul kita juga sudah usulkan tempo hari di jaman Pak Hendarman supaya Kasi-kasi itu serahkan kepada Jaksa tinggi, kepada Kajati termasuk sebenarnya Kajari. Kalau di kepolisian mungkin Saudara Jaksa Agung tahu, Kapolda itu bisa merekomendasikan seorang Kapolda. Kalau istilah mereka Kapolda itu usernya. Dia yang memakai supaya juga Kapolda itu punya kehormatan. Anak buahnya bisa patuh. Nah kalau di Kejaksaan sama kayak di pengadilan, di Mahkamah Agung. Semuanya di MA. Jadi menumpuk semua sentralistik seperti itu. Nah ini kedepan kita harapkan di jaman Pak Prasetyo ini bisa menjadi evaluasi juga sekaligus diubah. Kita tirulah apa yang bagus di polisi. Polisi itu sampai dengan Wakapolres itu bisa wewenang Kapolda. Dan Kapolda jadi punya ... betul dan di Kejaksaan kita harapkan juga seperti itu supaya Jaksa-jaksa ini juga dia punya ... terhadap jajaran dibawahnya.

Yang keempat Saudara Jaksa Agung, yang terakhir soal kasus-kasus pelanggaran HAM-nya kami ingin tahu sudah sampai sejauhmana sekarang ini karena yang paling ditunggu orang sukses story dari hampir 2 tahun pemerintahan Jokowi ini penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini pucuk-pucuk, kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Tolong dijelaskan juga karena dalam laporan Saudara Jaksa Agung ini tidak ada soal kasus-kasus pelanggaran HAM. Sekaligus kami titip Pak, karena jarang disebutkan kasus 27 Juli. Karena kalau kita mau jujur tonggak reformasi itu dimulai kasus 27 Juli Tahun '96. Bertepatan tahun ini 2016, 20 Juli itu 20 tahun. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Saudara Jaksa Agung kalau juga Saudara Jaksa Agung bisa memakai momentum 20 tahun peristiwa tragedy Dipenogoro 58.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Trimedya Panjaitan.

Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi. Lah itulah, mestinya PDIP yang dari Jaksa Agung ini. Lebih bagus kan sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu ada lagi.

Ini sudah pukul 16.00 kita perpanjang setengah jam ya. 16.30

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Sebelum saya serahkan ke Bapak Jaksa Agung untuk menanggapi tadi. Ada beberapa pertanyaan Pak, konfirmasi dan klarifikasi.

Yang pertama, tadi saya mendengar eksekusi hukuman mati 152 orang Pak ya? Berarti 152 ini menunggu giliran untuk dicabut nyawanya. Kita hanya untuk konfirmasi itu.

Yang kedua, pertanyaan saya Pak. Tadi pagi kita bahas anggaran, kami ingin tahu berapa besarnya biaya penanganan 1 perkara korupsi. 1 kasus korupsi itu rata-rata berapa. Kalau misalnya kita punya standar Pak, semua penegak hukum ini standarnya sama. Paling tidak untuk KPK dan Kejaksaan. Kalau saya tidak salah KPK punya ada standarnya. Kita jadi tahu kejaksaan ini berapa standarnya? Tapi kalau saya lihat disini penanganan perkara itu penyelidikan 570, penyidikan 521, penuntutan 751. Hampir luar biasa kinerja kejaksaan ini melebihi anggaran yang disiapkan, kan begitu. Ini bisa dibilang sebuah kehebatan prestasi tapi juga jadi pertanyaan. Darimana duit untuk menangani perkara, banyak sekali begitu. Apa tidak butuh duit? Nah ini makanya kita butuh standar. Anggaran berapa kebutuhan anggaran rata-rata untuk 1 kasus, 1 perkara.

Kemudian yang ketiga, kita saya tadi kaget itu TP4P, TP4D. Kalau saya tidak salah rujukannya instruksi Presiden focus pada pencegahan. Jadi pendampingan SKPD-SKPD dan pendampingan juga di, tentu di tingkat pusat kan begitu, Kementerian atau lembaga ditingkat pusat. Kita ingin tahu apakah ditingkat pusat ini ada juga pendampingan untuk APBN-APBN, kan begitu. Kalau daerah kan ada APBD-APBD tingkat I, APBD tingkat II. Tadi dilaporkan APBD didaerah. Itu ada. Kita ingin tahu di pusat ada juga gak pendampingan, apakah Kementerian apa yang pernah didampingi oleh kejaksaan agung untuk mencegah.

Kemudian ada 1 pertanyaan lagi yang menjadi masalah di daerah ini Pak Jaksa Agung. Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi untuk menghitung kerugian uang negara itu mereka minta BPK. Kalau BPK tidak mau kasih mereka minta BPKP. Kalau BPKP tidak juga, mereka minta politeknik. Tadi politeknik itu kok bisa menghitung kerugian negara dari sebuah proyek pembangunan misalnya. Saya tidak tahu kalau ada aturan baru. Tapi keluhan yang tadi disampaikan kepada kami didaerah-daerah itu begitu. Coba bayangkan bangunan, gedung yang dibangun 20 tahun lalu. Tiba-tiba dosen dari politeknik datang wah ini. Kurang besi berapa, kurang semen berapa, kerugian negaranya sekian. Ini problem didaerah ini. Kemudian ada 1 kasus Pak Jaksa Agung, ini berkaitan dengan penegakan hukum. Intinya kita mendukung penegakan hukum, yang penting tidak pandang bulu. Keadilan diutamakan. Ketiga tentu dasar hukumnya jelas.

Ada satu kasus laporan, nanti kami akan serahkan. Eksekusi barang sitaan. Yang menjual itu kejaksaan. Jadi masalah sekarang ini, orang yang membelinya itu jadi tersangka. Ya Jaksa juga ikut tersangka juga. Itu bagus. Yang jadi masalah adalah bukan hanya tahun ini kasus seperti ini terjadi. Tahun-tahun sebelumnya juga ada banyak pihak yang membeli besi tua ini, kan begitu. Asset-aset ini. Tahun lalu dibeli, juga bukan hanya si A yang membeli, si B, si C, Si D juga banyak pertanyaannya, kenapa hanya si A yang diproses secara hukum, yang B kok didiamkan, si C kok malah dilindungi. Ini jadi masalah. Nah itu yang jadi pertanyaannya. Penegakan hukum kita dukung tapi jangan dong pilih kasih. Nah itu harusnya dijelaskan supaya jangan ada kesan kejaksaan kok pilih kasih dalam penegakan hukum khususnya kasus korupsi. Ada dokumen yang disampaikan kepada kami, saya tadi membaca sepintas itu kasus yaitu kasus yang ada diatasnya itu yang saya sampaikan, lebih panjang lagi yang lainnya.

Kurang lebih ini beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Jaksa Agung dan jajarannya dalam kaitan dengan penegakan hukum di lingkungan kejaksaan.

Selanjutnya kami persilakan Jaksa Agung untuk memberikan tanggapan atas hal-hal yang ditanyakan tadi. Untuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti tidak usah dijawab, perlu tindakan bukan jawaban.

Kami persilakan.

JAKSA AGUNG RI:

Baik.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Ini mungkin saya jawab satu per satu, ada 11 penanya termasuk Pimpinan sendiri. Dari Pak Junimart Girsang, memberikan apresiasi penanganan perkara tapi dibalik itu tentunya mempertanyakan ... tinggi jumlahnya diselesaikan sementara biayanya sangat terbatas, bagaimana cara mensiasati ini? Nah ini memang problem yang selalu kami hadapi Pak Girsang, tapi itulah faktanya kita perlakukan. Yang pasti bagaimana pun baik di kejaksaan agung maupun kejaksaan daerah, ... berusaha semaksimal mungkin untuk mensiasati dengan mengelola dana yang ada itu seefisien mungkin dengan hasil tentu yang semaksimal mungkin. Caranya antara lain Pak Girsang ... yang perlu kami sampaikan adalah khususnya untuk pelaporan yang ditangani yang jauh dari ibukota Provinsi khusus perkara pidana khusus. Karena untuk para Pidsus ini penyidangnya harus dilakukan di Ibukota Provinsi karena misalnya di Merauke sidangnya di Jayapura sidangnya di Ambon, di Nias sidangnya di Medan di Cilacap sidangnya di Semarang, katakanlah seperti di Pacitan sidangnya di Surabaya. Antara lain dilakukan adalah dengan cara para saksi ketika adalah dilaksanakan penyidikan sudah terlebih dahulu disumpah. Hanya beberapa saksi yang memang diperlukan untuk hadir di persidangan yang dibawa ke persidangan sementara yang lain cukup dibacakan. Karena sesuai hukum acara saksi memberikan keterangan bahwa sumpah disetarakan dengan saksi yang ada di persidangan. Ini salah satu cara Pak Junimart Girsang.

Kemudian juga ada hitung-hitungan. Ini ... dalam menjelaskan nanti. Perhitungan penggunaan anggaran itu dikaitkan dengan cara tempuh. Misalnya tentunya Kejari yang berada di Ibukota Provinsi, biaya yang dikeluarkan tentunya tidak harus banyak mereka yang jauh dari Ibukota Provinsi. Ini juga satu hal kiat yang bisa diambil.

Kemudian, memang betul bahwa semua perkara yang diajukan atau ditangani oleh kejaksaan termasuk yang perkara yang ditangani oleh instansi penyidik lain itu harus ditindaklanjuti sampai tuntas Pak karena kalau tidak tentunya kita akan terancam atau dilaporkan atau digugat. Ini juga satu hal yang menjadi perhatian kami sehingga tentunya kekurangan dana memang agak sedikit, tentunya ... kinerja kejaksaan. Nah yang jelas kita selalu memberikan arahan kepada teman-teman Jaksa daerah untuk betapa pun kurangnya itu jangan sampai mempengaruhi integritas mereka. Terus terang memang sering kali dalam hal rangka penanganan korupsi khususnya yaitu banyak sekali godaan dan rayuan-rayuan dihadapi oleh para Jaksa karena yang dihadapi koruptor tentunya dia banyak uang, asumsinya begitu dan tentunya uang itu hasil dari kejahatan korupsi yang dilakukan sehingga dia mungkin saja mau bertindak dan ... sebagai sinterklas. Ini yang selalu kami tekankan kepada jajaran Jaksa di daerah atau dimanapun untuk ... terpengaruh dalam penanganan pada korupsi sehingga integritas mereka bisa terjaga.

Sementara Pak Tubagus Sumanjaya dari PKS. Memang dalam pembentukan Satgasus penanganan perkara tindak pidana korupsi kami merekrut jaksa pilihan dari daerah. Jumlahnya, awalnya sampai mencapai 100. Lebih dari 100 pun kemudian kita evaluasi. Ya memang untuk mereka ini meskipun akhirnya harus berkorban dari daerah harus pindah ke pusat dengan konsekuensi pisah dari keluarga, harus kost dan sebagainya. Tapi tentunya kami juga memberikan suatu reward kepada mereka yaitu mereka bisa naik pangkat dan ketika mereka ternyata dalam melaksanakan tugasnya itu membuat prestasi yang bisa dinilai sangat positif itu adalah 1 tiket bagi mereka untuk mendapatkan promosi, mendapatkan jabatan dan sebagainya. Ini yang sudah kita lakukan Pak. Jadi perhatian pada nasib mereka terkait dengan masalah jenjang karirnya ... perhatikan. ... kembali terpulang pada prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas mereka. Dan memang betul Pak bahwa pembentukan Satgasus penyelesaian penanganan korupsi ini juga tidak menambah beban anggaran. Ini faktanya memang seperti itu. Dan tentunya nanti kita harapkan di tahun-tahun yang akan datang. Jambin mencoba untuk sejak awal sudah merancang dan merencanakan untuk pemilihan atau pengajuan biaya untuk tugas-tugas Satgasus ini. Tapi yang pasti Pak, saya sampaikan bahwa Satgasus baik pusat maupun daerah itu memberikan hasil yang cukup menggembirakan sehingga dengan demikian upaya kita untuk melakukan ... korupsi itu bisa kita jaga dengan baik.

Kemudian mengenai masalah pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat oleh jajaran intelijen sampai Nanti Pak Jamintel bisa menjelaskan, nanti bisa menambahkan kalau misalnya ada waktu. Tapi yang pasti memang Kejaksaan tergabung dalam Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan pada masyarakat) dan itu bekerja yaitu secara lintas sectoral atau terdiri dari unsur Kemendagri, kemudian dari kepolisian, dari TNI, dari Majelis Utama dan dari forum lintas agama termasuk juga dari Kementerian Agama sendiri dan dari Kejaksaan. Mereka selalu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk membahas demikian banyaknya aliran kepercayaan dalam masyarakat dan untuk menginderai mereka kalau-kalau ada aliran kepercayaan yang justru bertentangan dengan ketentuan dan aturan Undang-Undang kita, apakah itu penurunan agama atau mengajarkan aliran sesat. Ini yang menjadi perhatian mereka.

Kemudian berikutnya dari Pak Jazilul Fawaid PKB, mengenai perincian jenis belanja. Ini saya pikir nanti Jambin juga bisa menjelaskan hanya saya ingin sampaikan

bahwa yang dikatakan sebagai pagu indikatif untuk program dukungan manajemen yang terkesan paling besar 70% adalah itu termasuk belanja pegawai, untuk gaji pegawai. Kenapa demikian? Karena ya itulah, dari 4,6 Triliun itu termasuk belanja pegawai. Jadi 7% memang terserap untuk gaji pegawai, jaksa maupun tata usaha. Sementara anggaran pengawasan saya pikir pengawasan tidak pernah mengeluh, mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal sebesar ... dan ini memang kita harapkan betul pengawasan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan deklarasi yang dinyatakan oleh pengawas sebagai *prime mover* tadi dan sebagai primus ... Tentunya disini kita berharap hasilnya tetap maksimal karena pengawasan termasuk yang paling berat menjawab untuk menjaga integritas dan roh kejaksanaan supaya tetap terjaga dengan baik.

Kemudian berkaitan dengan masalah Datun Pak. Datun justru perlu kami laporkan bahwa berapa pun surat kuasa khusus yang diterima atau berapa pun banyak MoU yang dibuat dan berapa pun LO yang dikeluarkan itu semuanya adalah Perbono Pak. semuanya non fee. Jadi semuanya menggunakan anggaran yang ada dan syukur Alhamdulillah sebenarnya disini Pak lebih banyak perkara yang kita menangkan daripada yang kalah. Banyak sekali yang kita menangkan, hanya memang ada beberapa yang kalah. Tentunya kita masih ada upaya hukum untuk mengajukan banding atau kasasi tapi yang pasti sebagian besar bahkan hampir seluruh perkara yang kita wakili baik dalam gugatan perdata atau pun tata urusan negara Alhamdulillah berhasil kita menangkan.

Kemudian Pak Jazilul mengenai pelaksanaan pidana mati. Kami berterima kasih atas dukungan yang ada meskipun tentunya kita juga sendiri melihat bahwa masih ada juga pro dan kontra mengenai pelaksanaan eksekusi mati ini baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita juga tahu persis ada teman-teman kita yang belum bisa memahami betapa mati ini harus kita laksanakan karena sudah demikian luar biasanya akibat yang ditimbulkan khususnya untuk perkara narkoba, terorisme dan juga perkara-perkara yang lain yang tentunya perlu pemenuhan dan sebagainya. Dan tentunya ini kembali kita harus coba sesekali melihat bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan dibanding dengan pelaku kejahatan yang sudah demikian banyak perlindungannya diatur dalam hukum acara kita. Saya ingin sampaikan bahwa menurut data yang kita dapatkan dari BNN, korban penyalahgunaan narkoba ini lebih dari 5 juta orang. Dan mayoritas itu usia produktif sehingga tentunya disini menjadi konsen kita bersama tentang bagaimana kita harus betul-betul bersikap keras dan tegas menghadapi kejahatan narkoba ini khususnya bagi para pengedar dan bandarnya. Sementara 5 juta lebih itu 1,4 Juta diantaranya itu sudah tidak mungkin itu disembuhkan kembali. Dan menurut data juga kurang lebih hampir 40 orang setiap hari meninggal karena kejahatan narkoba ini. Karenanya tentunya kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Komisi III untuk kiranya eksekusi pidana mati tetap harus dilanjutkan dan kami akan lanjutkan. Kalau selama ini ada kesan saya katakan agak tertunda ya tadi karena ada pertimbangan lain untuk lebih meretaskan pada sektor-sektor penyelenggaraan pemerintahan yang kita nilai lebih harus diprioritaskan yaitu perbaikan ekonomi.

Kemudian Pak Yayat dari Golkar. Penyadapan Pak, itulah memang faktanya seperti itu bahwa kejaksanaan memang punya alat sadap.

.....:

..... (suara tidak jelas).

JAKSA AGUNG RI:

Oh Pak Zaki Pak ya. Ini infonya Pak Jambin berarti keliru. Pak Zaki Sirat. Jadi itulah, memang kondisinya seperti itu. Undang-Undang mengatakan bahwa Kejaksaan tidak seperti halnya dengan KPK yang tidak disandera dengan rezim perijinan. Mereka bisa melakukan penyadapan atau menggunakan alatnya itu kapan pun dan kepada tahap apa pun. Pada saat penyelidikan pun mereka bisa melakukan penyadapan, pada saat penyidikan juga bisa, penuntutan bisa, bahkan eksekusi juga bisa. Sementara kejaksaan tidak bisa melakukan penyadapan pada saat penyelidikan. Padahal disanalah sebenarnya sangat kita perlukan untuk memudahkan pencarian bukti awal cukup yang nantinya akan kita jadikan sebagai dasar untuk meningkatkan penanganan perkaranya ke penyidikan.

Jadi ini masalah structural yang tidak bisa kita atasi karena nanti kalau misalnya kita melanggar ini bahkan kita yang disalahkan. Jadi kejaksaan hanya bisa menggunakan alatnya ketika tahapan penyidikan. Oleh karena itu sekarang ini kita fokuskan pada upaya untuk mengejar buron baik ditahap penyidikan sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana dan ini yang kita lakukan. Tapi tentunya ini merupakan suatu dukungan juga dari Komisi III untuk kenapa kejaksaan tidak bisa sama dengan KPK untuk menggunakan alatnya sehingga dengan demikian kalau misalnya kita bisa lakukan mungkin kita paling tidak bisa menyamai apa yang mereka hasilkan.

Pak Wihadi Wiyanto dari Gerindra. Satgasus P3TPK, tidak melihat ada ... Jadi begini Pak bahwa Satgasus P3TPK ini bukan hanya di pusat tapi juga didaerah. Di setiap Kejati, Kejari juga ada. Dan seperti yang saya katakan tadi hasilnya cukup menggembirakan karena mereka didaerahnya masing-masing berhasil mengungkapkan kasus korupsi yang memang harus diungkapkan. Tentunya dalam mengungkapkan kasus korupsi ini kami sudah arahkan dan kami sudah berikan satu penekanan untuk hendaknya mereka laksanakan dengan objektif, mengedepankan objektivitas, personalitas dan proporsionalitas. Jadi tidak ada kesan mencari-cari atau mereka ... dan sebagainya. Inilah yang kita lakukan. Dan akan halnya kasus pra peradilan yang kami sempat dikalahkan berulang kali. Inilah persoalan juga yang kita hadapi sekarang ini. Ketika saya katakan tadi bahwa ini dampak dari kita hadapi ketika MK membuat keputusan menyatakan bahwa penetapan seorang tersangka itu menjadi cakupan dari objek pra peradilan. Akhirnya yang sekarang ini terjadi adalah setiap kali orang dinyatakan sebagai tersangka serta merta mereka mengajukan tuntutan pra peradilan. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa dari semua putusan pra peradilan itu tidak ada satu pun yang pertimbangan hukumnya itu sama. Ini satu hal yang juga agak sedikit aneh dan ... kita. Tapi ini juga satu hal yang tentunya menambah PR bagi, bukan hanya kejaksaan saya rasa tapi nanti pada gilirannya mungkin Polri dan KPK sendiri.

Mengenai masalah kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) Pak ya. Bimtek di Bojonegoro ya Pak Wiyadi. Ini nanti akan kami cek. Kenapa kok ada kesan disparitas dalam perlakuan, ada yang dihukum dan tidak. Saya minta Jambidsus nanti coba dicek. Di Bojonegoro ... untuk Bimtek 2012. Ini biasanya untuk para Anggota Dewan di daerah dan menerima raport itu mendapatkan dana Bimtek ini. Nah mungkin saja ada diantaranya yang ternyata Bimteknya itu fiktif pelaksanaannya sehingga di proses hukum.

Tapi kalau betul yang lain juga melakukan yang sama tentunya harus diperlakukan sama. Jangan sampai ada disvarietas atau perubahan perlakuan.

Pak Nasir Jamil, kita akan pertimbangkan nanti untuk JMK (Jaksa Masuk Kampus) tapi pemahaman kami ya kampus pun itu juga bagian daripada sekolah. Hanya sekolah tinggi. Kita menghindari terlalu banyaknya nanti sebutan-sebutan sehingga kita cukup katakan sebagai ... dan ini sudah berjalan Pak. Dan hasilnya sangat menggembirakan.

Mengenai AMC, itu khusus hanya untuk ini tidak termasuk untuk memburu asset di luar negeri. Itu ada timnya tersendiri, tim pemburu koruptor. Dan itu berada dibawah koordinasi Pak Menkopolhukam. Memang itu diketahui oleh wakil Jaksa Agung dan beberapa unsur daripada instansi lain.

Mengenai barang rampasan dan barang sitaan yang terbengkalai. Nah ini menjadi pemikiran kami juga Pak Nasir Jamil. Makanya kami sudah mulai membuat semacam pemikiran dan mulai mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa pihak terkait, katakanlah dengan Mahkamah Agung dan dengan Polri, Kapolri. Jadi selama ini sebetulnya yang kami jelaskan bahwa yang banyak menjadi masalah adalah barang-barang rampasan dan barang sitaan untuk barang-barang bergerak khususnya motor dan mobil. Jadi disini memang sering sekali kita mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi untuk barang-barang yang bergerak ini karena antara lain, peserta lelang itu selalu menghendaki adanya surat menyurat dari kendaraan bermotor itu. Sementara ketika dilakukan penyitaan sering kali surat menyuratnya tidak disertakan sehingga mereka tidak ada yang berminat untuk ikut lelang. Untuk itu kami sudah menyurati Kapolri, kiranya risalah lelang itu bisa dijadikan sebagai pengganti ketika mereka mengajukan surat kepemilikan yang baru. Begitu pun dengan barang sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya, ini juga masalah mau dikemanakan karena tentunya kalau kita selesaikan dengan tanpa dasar hukum yang benar tentunya bisa disalahkan karenanya kami membuat surat kepada Mahkamah Agung untuk kiranya bisa membuat fatwa kepada para Ketua ... Negeri dan Tinggi untuk barang-barang sitaan yang tidak diambil pemiliknya ini bisa dinyatakan sebagai barang temuan sehingga bisa dilakukan pemusnahan atau dijual lelang. Ini juga masalah yang sedang kami usahakan supaya ada solusi penyelesaian yang baik.

Mensikapi pra peradilan yang berulang kali, misalnya kasus perkara Dahlan Iskan dan sebagainya. Tidak ada Pak, kita berusaha Pak untuk ... kasus seperti ini. Kami tetap akan perlakukan itu. Hanya nanti pada gilirannya kita ambil contoh seperti ... Saya sudah katakan berapa pun kali itu dikalahkan kita, berapa kali itu pula kita akan ... baru karena kami beranggapan bahwa pra peradilan bukan akhir dari penyelesaian suatu perkara, dia baru awal. Sementara perbedaan pendapat antara pengadilan dan kejaksaan tidak harus dinyatakan sebagai suatu hal yang terlalu ekstrim karena ini mungkin perbedaan pemahaman saja tapi yang pasti kejaksaan melihat dan menilai bahwa serta beranggapan bahwa putusan pra peradilan itu belum menyentuh materi perkaranya. Karenanya tentunya masih bisa dibuka kembali. Dan tentunya dengan memperhatikan pendapat dan dictum daripada ... itu sendiri.

Perkara Novel Pak Baswedan, ini memang ada perbedaan pendapat juga antara Jaksa penuntut umum dengan hakimnya karena tentunya pihak kejaksaan tetap menyatakan bahwa kasus itu sebenarnya sudah daluwarsa. Namun demikian karena pada saat dilimpahkan ke pengadilan belum mulai disidangkan perkaranya sehingga si tersangka belum jadi terdakwa. ... tentunya kita bisa menyatakan bahwa argo daripada

perhitungan daluwarsanya masih berjalan. Jadi belum bisa dinyatakan sudah berhenti. Sehingga dengan demikian pada tanggal 18, 40 hari Tahun 2016. Itu perkara Novel Baswedan masih daluwarsa. Ini yang masih menjadi pemikiran kami dan kami akan pelajari kembali, apakah memang perkara ini layak dan patut untuk diajukan kembali. Sementara mohon maaf, kami sampaikan bahwa kita juga harus memperhatikan atau menghormati asas Tuminuslitis. Dimana pihak yang paling berwenang berhak untuk menentukan satu perkara. Nanti bisa juga diajukan ... ke persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum. Kami menghadapi banyak sekali ini. Bukan banyak sekali ya. Kita menghadapi adanya unjuk rasa-unjuk rasa tapi ini juga kita lihat munculnya baru belakangan ini. Dan kita tahu persis siapa yang menggerakkan.

Dana hibah Pak, tidak ada pemikiran kami untuk melakukan disvarietas atau tebang pilih. Saat sekarang ini bukan hanya untuk kasus yang terjadi di Sumatera Utara dan kebetulan itu Pak Gatot Pudjo Nugroho yang orang Magelang. Dan saya tahu itu. Hanya kebetulan mungkin 1 partai dengan Pak Nasir Jamil. Nah sekarang ini sudah tahap pertama untuk nantinya diteliti berkasnya. Sementara yang lainnya pelaku lainnya sudah diproses di persidangan. Jadi nanti ada tahapan berikutnya Pak, tahap kedua. Kalau sudah dinyatakan lengkap berkasnya baru akan dilimpahkan ke pengadilan. Hari-hari ini juga kami sedang menangani kasus penyimpangan dana ... social atau dana hibah di Sumatera Selatan. Dan saya dapat laporan dari Jampidsus bahwa saat ini sudah ditetapkan 2 orang tersangka yaitu Kesbangpolnya dan Kepala BPKAD-nya. Hanya belum ada penahanan Pak. Kita masih belum melakukan upaya paksa. Mudah-mudahan mereka tidak mengajukan pra peradilan.

Kemudian Pak Bli Putu Sudiartana, ya ini terkait dengan kasus ya. Ini saya pikir kita cek ya. Bagaimana yang sebenarnya. Itu yang pasti bagaimanapun tentunya para Jaksa itu kita harapkan dia menangani kasus dengan fakta dan bukti yang jelas sehingga tentunya tidak ada kesan kriminalisasi atau politisasi dan lain sebagainya.

Nah mengenai masalah keterlibatan dari para pemangku adat disana ya saya pikir sebaiknya kita harus lebih hati-hati dan menghindari kesalahan. Tapi bagaimana pun akan kita cek nanti. Begitu pun mengenai kasus mantan Bupati Jembrana. Kita akan coba nanti apakah benar penanganannya berulang kali berlarut-larut.

Pak ... dari Partai Nasdem. Memang betul, saya pernah menyatakan bahwa keinginan dari terpidana Samadikun Hartono yang justru 4 tahun lari baru kita temukan kemudian berhasil kita pulangkan. Untuk mengangsur uang pengganti yang harus dibayarnya sebesar 169 Miliar untuk dicicil selama 4 tahun dan 4 tahap. Setiap tahun dari laporan dari Jampitsus 42 Miliar. Saya nyatakan bahwa saya kurang setuju dengan ini dan saya akan minta kepada Jampitsus untuk membicarakan ulang, kalau perlu dengan tentunya kita harus menentukan sikap bukan kita ikut keinginan mereka karena yang kita dengar bersama si Samadikun Hartono ini juga punya rumah di Menteng sana, tentunya kalau misalnya pun dia segan untuk dengan sukarela memenuhi kewajiban ... intinya rasanya rumah itu bisa disita dan dilelang karena tentunya kita bisa melakukan itu. Nanti saya minta Jampitsus dan jajarannya untuk memperhatikan ini supaya kita tidak mempermainkan mereka karena 169 pun bagi dia itu sebenarnya sudah untung. Ini bagaimana kalau kita kurskan uang ini di 4 tahun yang lalu, tentunya jumlahnya lebih besar. Jadi saya pikir jangan kita mengikuti arus keinginan mereka.

Mengenai surat dari pengurus besar IDI yang menolak untuk dilibatkan dalam eksekusi kebiri. Saya sudah nyatakan bahwa IDI adalah organisasi profesi. Tentunya kita

tidak akan ... dengan mereka tapi kita hanya berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Nanti biar Menteri Kesehatan yang mengatur itu, apakah harus dokter yang melakukan atau cukup para medis. Itu saya rasa bisa melakukan juga karena hanya menyuntik saja. Mungkin kita pun kalau diajari sebentar bisa tapi kan tentunya ketentuan perundangannya seperti itu. Harus melibatkan tenaga medis untuk melakukan ini supaya lebih terjamin keberhasilan pelaksanaannya. Jadi selagi IDI adalah organisasi profesi yang tentunya dia bisa saja berpendapat seperti itu tetapi dalam konteks pelaksanaan putusan ini kita akan berbicara dengan Kementerian Kesehatan yang kebetulan juga dokter.

Mengenai Pak Edi Kusuma Pak, ini saya pikir 1 guru 1 ilmu. Bapak pernah jadi penyidik dan kami juga penyidik penuntut juga. Jadi sesungguhnya tidak ada istilahnya kita menyembunyikan penanganan 1 kasus saya. Sementara saya ingin sampaikan bahwa kasus yang melibatkan Saudara Wawan, Akil Mukhtar dan Ratu Atut itu ditangani oleh KPK. Memang ada beberapa kasus lain yang ditangani oleh Kejaksaan dan ini sendiri berjalan Pak yaitu, coba saya pikir Jampitsus coba jelaskan.

Mohon ijin Pimpinan supaya Jampitsus untuk menjelaskan sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

Bisa lebih singkat saja Pak. Saya perpanjang dulu ini Pak. Saya perkiraan tidak lebih dari 10 menit kita perpanjang 15 menit.

(RAPAT : SETUJU)

JAKSA AGUNG RI:

Oke. Jadi begini saja, saya laporkan bahwa untuk kasus lain pun ,, , menangani dan kami tangani dengan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha kita untuk menyembunyikan ... dan sebagainya. Sementara 80 mobil yang konon disita dari Wawan itu bukan kejaksaan yang menyita tapi ... yang menyita. Nanti akan kita koordinasikan dengan KPK.

Terus kemudian kami juga ingat pesan dari Komisi III ini untuk penanganan perkara korupsi harus dilakukan dengan cermat, hati-hati. Dengan menjunjung tinggi pertimbangan keadilan dan sebagainya. Ini yang kita lakukan sehingga tentunya mungkin kita disini memerlukan waktu yang lebih panjang.

Kemudian Pak Trimedy Panjaitan, kekosongan posisi wakil sedang kami proses. Nanti tentunya ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena kita akan bicarakan karena harus proses TPA dan sebagainya. Ini akan kita usulkan dari tentunya potensi yang ada disini.

Kemudian ada 3 sampai 5 Kejari di Dapilnya di Trimedy Panjaitan yang sudah lebih dari 2 tahun bertugas. Memang itu kondisinya memang seperti itu. Bukannya sekarang, tapi sejak dulu pun begitu. Kenapa demikian? Karena formasi di Kejaksaan sangat terbatas. Saya ingin laporkan bahwa sekarang ini bahkan ada lebih dari 1500 mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi Kajari, itu masih menunggu giliran. Jadi ini

satu hal yang tentunya perlu ... bersama. Saya pikir para Kajari itu bisa memahami ini, karena untuk menggeser 1 orang atau memindahkan 1 orang itu rangkaian gerbongnya panjang sekali. Ini harus kita pertimbangkan juga. Dan tentunya mungkin Pak Trimed bahkan saya harapkan bisa ikut menjelaskan kepada mereka. Saya selalu katakan kepada mereka bahwa ketika kita melihat kebawah, apa yang didapatkan ... Jadi mereka yang sudah jadi Kajari itu harus merasa itu sebagai satuan yang harus di syukuri karena masih banyak lagi mereka yang belum dapat giliran seperti ini. Memang kita menginginkan supaya proses rotasi, mutasi, promosi ini bisa berjalan, tepat waktu atau tidak berlarut-larut tapi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ya tadi masalah anggaran dan masalah formasi tadi. Kami selalu ada Pak yang namanya Rapat Pimpinan untuk membahas ... mutasi ini selalu kami lakukan. Tapi tentunya menunggu ketika ada formasi yang kosong, apakah karena pensiun dan sebagainya, dan sebagainya. Atau ada yang meninggalkan posisi karena dikaryakan ditempat lain. Jadi ketika ada yang kosong itu selalu akan segera kita isi. Jadi tidak pernah berlama-lama ada ... Dan sekarang Alhamdulillah tidak ada Pak Kajati yang merangkap, tidak ada. Semuanya sudah terisi. Jadi tentunya kita harapkan dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya di tempat masing-masing dengan lebih maksimal.

Mengenai masalah penunjukkan atau pengangkatan Kasi pun oleh Kejaksaan Agung pun, mungkin Pak Jamin sebentar jelaskan Pak. Pak Jamin lebih tahu itu masalahnya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN JAKSA AGUNG RI:

Terima kasih Pak.
Mohon ijin.

Pak Pimpinan dan Bapak/Ibu yang terhormat,

Kami sudah pernah berkirim surat ke BKN Pak untuk hal seperti itu. Jawaban BKN bisa atau boleh Kajati memindahkan asal di Kejaksaan Tinggi di setempat itu ada Baperzakat, ada Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan. Padahal di setiap Kejati itu tidak ada dan adanya hanya di Kejaksaan Agung.

Terima kasih Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Kalau begitu coba nanti kita pikirkan, apakah di Kejati bisa bentuk Baperzakat atau tidak. Saya sependapat dengan Pak Trimed tadi bahwa dengan memberikan sebagian kewenangan ... kepada Pimpinan Daerah itu juga untuk meningkatkan wibawa mereka. Dan semuanya bisa menilai langsung Anggota dilingkungan masing-masing. Karena paling tahu prestasi ... daripada Jaksa adalah Pimpinan didaerah yang bersangkutan.

Mengenai masalah pelanggaran HAM berat ini, saya pikir pernah laporkan juga bahwa sekarang ini yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat yang dalam proses penanganan adalah ada 6 perkara Pak. Memang tidak termasuk disitu 27 Juli. Namun demikian karena Komnasham sendiri pun belum pernah melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Kami hanya tentunya tergantung dari hasil penyelidikan Komnasham.

Sementara 6 yang kami sebutkan tadi sedang diupayakan dan sedang ditawarkan untuk dilakukan penyelesaian melalui non yudisial. Ini yang masih pro dan kontra. Dan saya pikir nantinya perlu segera kita pikirkan bagaimana penyelesaian yang terbaik karena bagaimanapun kita inginkan supaya perkara pelanggaran HAM berat ini bisa segera dituntaskan. Mengingat pelanggaran HAM berat ini tidak mengenal daluarsa. Saya khawatir nanti kapan pun saatnya kalau tidak diselesaikan sekarang akan menjadi warisan terus. Ini saya rasa suatu hal yang kurang baik. Dan yang kedua, supaya bangsa kita tidak selalu tersandera oleh beban sejarah masa lalu.

Dari Pak Benny, betul Pak. Jadi terpidana mati yang menunggu giliran eksekusi 152 orang. Mengenai besarnya biaya Pak Jampitsus. Penanganan perkara untuk Pidsus. Jadi maksimum ini.

Coba jelaskan Pak Jampitsus.

JAMPITSUS:

Ijin Bapak Jaksa Agung, Pimpinan yang terhormat,

Bahwa biaya perkara maksimal 189 Juta, itu mulai dari penyelidikan sampai dengan eksekusi. Nah pembagiannya ini Kajari 1 perkara, Kejati 2 perkara, dan Kejagung untuk hanya ... saja 110 perkara. Perlu juga kami sampaikan bahwa untuk polisi belum termasuk disini. Karena polisi kan Cuma litdik saja, penuntutan ke kejaksaan.

Demikian Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Jadi penuntutan untuk perkara-perkara yang disidik oleh instansi lain Pak, ... dari Polri termasuk dalam anggaran yang disiapkan untuk kejaksaan. Itu masalah juga.

Berikutnya Pak Pimpinan yang saya hormati, memang justru dengan dibentuknya TP4, baik Pusat maupun daerah ini justru untuk menyatakan kebijakan kejaksaan bahwa kita lebih akan menekankan pada upaya pencegahan Pak. Jadi preventif, dan represif. Sementara kalau tadi ditanya mengenai siapa saja yang sudah melakukan kerjasama dan minta pendampingan dari TP4 ini baik pusat, ada di pusat. Di Kementerian Pertanian, PUPERA, ESDM, Kemempora, terus kemudian Dikbud juga sudah dan BUMN sudah ... antara lain PLN. Jadi kami sekarang bahkan teman-teman dari Intel ini merasa kewalahan karena banyaknya pihak-pihak yang minta untuk dilakukan pendampingan dalam melakukan program pembangunannya.

Nah mengenai masalah kerugian negara Pak. Justru sebenarnya kalau kita mengikuti dalam hukum acaranya tanpa meminta audit daripada ... pun kita bisa mengajukan satu perkara kalau memang sudah cukup jelas. Nah untuk permintaan audit kerugian dari Politeknis misalnya, itu justru kalau kita menghadapi kesulitan disatuan 4. Jadi satu perkara yang tanpa ada audit dari BPK atau BPKP bisa kita ajukan. Karena memang kerugian negara sudah jelas. Jadi itu bukan persyaratan yang bisa membatalkan penanganan satu perkara. Karenanya tentunya kalau BPK, BPKP katanya adalah sulit untuk ... kita bisa minta kepada pihak lain. Ini yang kami lakukan dan tidak ada larangan untuk meminta audit dari. Yang penting bagaimana kita bisa menyakinkan hakim ketika di persidangan nanti bahwa itulah kerugian negaranya. Dan itulah hasil audit dari pihak lain. Bukan BPK dan BPKP.

Kemudian mengenai masalah barang rampasan yang jual justru oleh pihak kejaksaan. Ini di kampung kita Pak Benny Karman. Saya bahkan kenal baik dengan Jakjanya. Jaksa Jamirotu namanya. Tapi karena dia ... kesalahan seperti itu ya harus kita proses. Termasuk juga kenapa pembelinya di proses, karena ya paling tidak dia bersama-sama melakukan kejahatan korupsi disana atau ... pidana umum dia bisa dinyatakan sebagai penadah. Itu yang kami lakukan. Sementara apakah benar ada pembeli lain selain pembeli yang diproses sekarang, nanti akan kita cek. Jadi kami tidak ada istilah pilih kasih. Semua yang ada fakta, bukti melakukan kejahatan tentunya akan kita proses.

Itu mungkin Bapak Pimpinan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau katakan sudah cukup kami akhiri dengan ***Wabilluhitaufiq Walhidayah,***

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat sore,
Salam sejahtera, dan
Oom santi, santi, santi oom.**

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih ada penjelasan Saudara Jaksa Agung. Tadi yang kami sampaikan itu adalah laporan masyarakat. Benar atau tidak, silakan diperiksa. Kalau tadi nanti tidak ditindaklanjuti Komisi III akan melakukan kunjungan spesifik. Kalau tetap juga tidak mempong kita bikin Panja supaya tahu yang salah siapa. Jadi nanti mohon nanti laporan-laporan ini ditindaklanjuti. Kalau memang betul ditindaklanjuti, kalau memang tidak. Kadangkala kita harus mengakui juga namanya manusia. Ada juga kesalahan Pak. Kalau memang salah ya kita perbaiki. Jadi sebelum saya membacakan kesimpulan, saya serahkan dulu dokumen-dokumen, pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Komisi III kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. (rekaman terputus).

Kalau begitu bubarkan saja pengadilan nanti kan begitu Pak Trimedya atau putusan khusus. Saya rasa begitu Pak Jaksa Agung.

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Terima kasih banyak Pak.

Rapat kami tutup. Disertai ucapan terima kasih kepada Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya. Demikian juga kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi III dan Pimpinan pinan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.45 WIB)